

**ANALISIS TINGKAT PEMAHAMAN WAJIB PAJAK MENGENAI
PERATURAN PELAKSANAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DAN
PENGARUHNYA TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI
KECAMATAN MARPOYAN DAMAI**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mengikuti Ujian Oral
Comprehensive Strata 1 Pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

OLEH

ARDHA NURFITRINISA
NIM :10973006422



**PROGRAM S.1
JURUSAN AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU**

2013

**ANALISIS TINGKAT PEMAHAMAN WAJIB PAJAK
MENGENAI PERATURAN PELAKSANAAN PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN (PBB) DAN PENGARUHNYA TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KECAMATAN MARPOYAN
DAMAI**

SKRIPSI

OLEH

ARDHA NURFITRINISA

NIM: 10973006422



PROGRAM S.1

JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

2013

KATA PENGANTAR



Assalamu‘alaikum Wr. Wb

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT karena atas berkah, rahmat dan karunia-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Mengenai Peraturan Pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan dan Pengaruhnya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kecamatan Marpoyan Damai”.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh Gelar Sarjana Lengkap pada Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Jurusan Manajemen di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kelemahannya, untuk itu penulis menerima dengan senang hati segala kritikan dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Skripsi ini terwujud dengan dukungan dan peranan dari berbagai pihak. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membimbing dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yaitu kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. M Nazir selaku Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau beserta Staf.
2. Bapak Mahendra Romus, SP. M. Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Uinversitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.
3. Bapak Drs. Almasri, M.Si selaku Pembantu Dekan I, Bapak Drs. Alpizar, M.Si selaku Pembantu Dekan II, Bapak Drs. Zamharil

Yahya,MM selaku Pembantu Dekan III yang banyak membantu dalam proses penulisan dari awal hingga akhir.

4. Bapak Dony Martias, SE, MM selaku Ketua Jurusan Akuntansi S1 dan Ibu Desrir Miftah, SE, MM, Ak selaku sekretaris Jurusan Akuntansi S1 yang banyak memberikan support dan kemudahan kepada penulis.
5. Ibu Eni Noviarni, SE. M.Si. Ak selaku Penasehat Akademis yang ikut memantau perkembangan penulis dari awal perkuliahan hingga akhir dan membantu dalam kesulitan perkuliahan.
6. Bapak Alchudri,MM.CPA selaku pembimbing proposal dan Ibu Ikhwan Ratna SE. M.Si selaku pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu untuk penulis dalam memberikan bimbingan dan arahan yang sangat berarti bagi penulis. Terima kasih atas kesabaran dan kemudahan yang bapak dan ibu berikan selama penulisan skripsi ini.
7. Bapak Hendra Afriadi selaku sekretaris Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, Bapak Ahmad Fauzan R selaku Kepala Bidang Bagi Hasil Pendapatan Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru beserta staff, serta Staff Kecamatan Marpoyan Damai yang bersedia memberikan data dalam proses penulisan skripsi.
8. Teristimewa kedua orang tua tercinta, ayahanda Ir. Emri Nurdin dan ibunda Nurfiati Amran yang tak pernah lelah membina, membesarkan dan memberikan dorongan moril, materil, dan spiritual sehingga penulis dapat menjadi orang yang berpendidikan. Serta Adikku Dian Demisa Ananda Putri dan Ririn Trikaori.
9. Kepada yang tersayang, Om Yayat, Nte Netti, Om Ikhsan, Nte Fera,Nte Yuli, Umi Sari, Abi Edi, Opa Amran yang telah mendukung sepenuhnya penulis, serta dukungan moril yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Riau, Pekanbaru.

10. Adek-adek ku sayang, Falah, Salsa, Arsyad, Fanny, Raihan, Fadil, Fikri, Rasyid.
11. Untuk sahabat-sahabat ku, teman senasib, seperjuangan, dan sepenanggungan Eka Safitri, Iis Biyati, Yuliana Sri Hartati yang sudah memegang teguh prinsip berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, sehingga semua proses yang berat selama ini terasa ringan dengan adanya kalian.
12. Untuk Nurbaida, Nurhayati, Dewi Sumarni, Hartini terima kasih atas semangatnya.
13. Kepada Yuristira Putri, yang sudah mengajarkan penulis untuk mereview pelajaran akuntansi, terima kasih sudah mau menjadi guru privat dadakan ☺.
14. Terkhusus untuk Deski Wiri Yendra yang selalu ada dalam suka dan duka, dan ikut berperan penting dalam penyelesaian skripsi ini.
15. Terima kasih kepada teman-teman sejawat terkhusus kelas Akuntansi D dan konsentrasi Perpajakan, serta teman seperjuangan skripsi yang menemani penulis dari awal hingga akhir perkuliahan.
16. Kepada pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Pekanbaru 02 Mei 2013

Penulis

DAFTAR ISI

[illegible]

2.1.5 Pendaftaran, Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP), Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), dan Surat Ketetapan Pajak (SKP)	23
2.1.6 Tata Cara, Jatuh Tempo, Pembayaran dan Penagihan PBB	26
2.1.7 Kewajiban dan Hak Wajib Pajak PBB	27
2.1.7.1 Kewajiban Wajib Pajak PBB	27
2.1.7.2 Hak Wajib Pajak	28
2.1.8 Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan	28
2.1.9 Keberatan dan Banding	29
2.1.9.1 Keberatan	29
2.1.9.2 Banding	30
2.1.10 Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah	31
2.1.10.1 Tugas Para Pihak dalam Pengelolaan PBB	32
2.1.10.2 Implikasi Sosial dan Ekonomi	35
2.1.11 Pajak Dalam Perspektif Islam	36
2.1.11.1 Landasan Kewajiban Membayar Pajak	36
2.1.11.2 Pengertian Pajak Menurut Syariat	37
2.1.11.3 Pajak Sebagai Ibadah	37
2.2 Pemahaman Wajib Pajak Mengenai Peraturan Pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan dan Pengaruhnya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	39
2.2.1 Kepatuhan Wajib Pajak (<i>Tax Compliance</i>)	39
2.2.2 Pemahaman Mengenai Peraturan Pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan	43
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	49
3.1 Desain Penelitian	49
3.2 Jenis dan Sumber Data	49
3.3 Metode Pengumpulan Data	50
3.4 Populasi, Sampel dan Metode Pengambilan Sampel	50

3.5	Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel	53
3.6	Identifikasi dan Pengukuran Variabel	55
3.7	Kerangka Pemikiran	56
3.8	Teknik Pengujian Instrumen	56
3.8.1	Uji Statistik Deskriptif	56
3.8.2	Uji Kualitas Data	56
3.8.2.1	Uji Validitas	57
3.8.2.2	Uji Reliabilitas (<i>Test of Reliability</i>)	57
3.8.3	Uji Normalitas	58
3.9	Metode Analisis Data	58
3.9.1	Analisis Korelasi Sederhana (<i>Bivariate Correlation</i>)	59
3.9.2	Uji Linearitas (<i>Test of Linearity</i>)	61
3.10	Pengujian Hipotesis	61
3.10.1	Uji Parsial (Uji t)	62
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	63
4.1	Deskriptif Karakteristik Responden	63
4.1.1	Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	63
4.1.2	Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Umur	64
4.1.3	Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan	64
4.1.4	Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan	65
4.2	Statistik Deskriptif Responden	65
4.3	Pengujian Kualitas Data	69
4.3.1	Uji Validitas	69
4.3.2	Uji Reliabilitas	71
4.3.3	Uji Normalitas	72
4.4	Uji Asumsi Klasik	75
4.4.1	Uji Korelasi	75
4.4.2	Uji Linearitas	76
4.5	Pengujian Hipotesis	76
4.5.1	Analisis Regresi Sederhana	77
4.5.2	Pengujian Variabel Secara Parsial	78

	4.6 Pembahasan Hasil Penelitian	78
BAB V	PENUTUP	81
	5.1 Kesimpulan.....	81
	5.2 Keterbatasan Penelitian.....	83
	5.3 Saran.....	83

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur. Untuk melaksanakan pembangunan guna mencapai tujuan tersebut dibutuhkan dana yang tidak sedikit. Pada awalnya, sebagian besar dana tersebut berasal dari penerimaan pemerintah dari hasil penjualan minyak bumi dan gas (migas). Namun dengan terjadinya resesi dunia dan situasi moneter internasional yang tidak menguntungkan serta merosotnya harga minyak dunia pada pertengahan tahun 80-an telah menyebabkan berkurangnya kontribusi migas dalam penerimaan negara. Terjadinya situasi ini membuat pemerintah sadar bahwa penerimaan negara tidak bisa lagi sepenuhnya digantungkan pada sektor migas ini. Pemerintah harus segera mencari alternatif lain untuk tetap dapat melanjutkan pembangunan.

Salah satu langkah yang diambil pemerintah pada saat itu adalah mengubah arah kebijakan pembangunan dengan memfokuskan perhatian pada penerimaan negara dari sektor pajak. Oleh karena itu, pada tahun 1983 pemerintah melakukan gerakan Pembaharuan Sistem Perpajakan Nasional (PSPN), yakni dengan melakukan perombakan secara total pada peraturan-peraturan di bidang perpajakan.

Penerimaan pajak merupakan gambaran partisipasi masyarakatnya dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dinegaranya. Pajak yang dipungut dari masyarakat sesuai ketentuan akan dikembalikan kepada masyarakat oleh pemerintah dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana, menyediakan lapangan kerja, memberikan rasa aman dan lainnya yang termasuk pengeluaran umum.

Salah satu jenis pajak di Indonesia adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). PBB merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang pelaksanaan pemungutan dan penerimaannya diserahkan kepada pemerintah daerah masing-masing sesuai dengan letak objek tersebut (pajak daerah). Dalam hal ini melibatkan Dinas Pendapatan Daerah, Kantor Camat dan instansi pemerintah lainnya.

Pajak daerah merupakan sumber pendapatan yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata, luas, dinamis dan bertanggung jawab sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Pemerintah melakukan perubahan terhadap Undang-undang Pajak Bumi dan Bangunan, yaitu: UU No.12 tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan menggantikan UU No.12 tahun 1984, selanjutnya UU ini disebut dengan UU PBB 1994. Berikut falsafah UU PBB No.12 tahun 1994:

- a. Perlunya ditetapkan Nilai Jual Kena Pajak yang lebih memadai.
- b. Adanya Kepastian hukum bagi wajib pajak.
- c. Penghitungan PBB perlu ditinjau ulang dan disesuaikan dengan perkembangan perekonomian nasional.

Tujuan perubahan UU PBB No.12 tahun 1994 adalah:

- a. Meningkatkan penerimaan negara sebagai akibat dari peningkatan kepatuhan dan meningkatnya jumlah perumahan dan jumlah tanah yang dikelola.
- b. Meningkatkan kepastian hukum dan keadilan.
- c. Memberikan keringanan kepada masyarakat yang tidak mampu untuk melakukan pembayaran PBB nya dengan baik, benar dan patuh (Fidel, 2010: 44-45).

Pemerintah membuat kebijakan baru yang telah diatur di dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang memuat tentang pengalihan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang merupakan suatu bentuk tindak lanjut kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Dengan pengalihan ini maka kegiatan proses pendataan, penilaian, penetapan, pengadministrasian, pemungutan/penagihan dan pelayanan PBB-P2 akan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota).

Tujuan Pengalihan pengelolaan PBB-P2 menjadi pajak daerah sesuai dengan Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah:

- a. Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah.
- b. Memberikan peluang baru kepada daerah untuk mengenakan pungutan baru (menambah jenis pajak daerah dan retribusi daerah).
- c. Memberikan kewenangan yang lebih besar dalam perpajakan dan retribusi dengan memperluas basis pajak daerah.
- d. Memberikan kewenangan kepada daerah dalam penetapan tarif pajak daerah.
- e. Menyerahkan fungsi pajak sebagai instrumen penganggaran dan pengaturan pada daerah.

Peralihan PBB perkotaan dan pedesaan dari pajak pusat menjadi pajak daerah akan memberi dampak terhadap keuangan negara dan keuangan daerah. Pada prinsipnya secara administrasi terjadi perpindahan pencatatan hasil pemungutan PBB, jika sebelumnya penerimaan PBB tercatat pada keuangan negara (APBN) dalam penerimaan perpajakan, kemudian setelah mekanisme peralihan berjalan akan masuk dalam PAD khususnya pajak daerah.

Dengan telah diberlakukannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah ditetapkan bahwa jenis pajak daerah sebagai berikut:

1. Pajak Hotel.
2. Pajak Restoran.
3. Pajak Hiburan.
4. Pajak Reklame.
5. Pajak Penerangan Jalan.
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
7. Pajak Parkir.
8. Pajak Air Tanah.
9. Pajak Sarang Burung Walet.
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Selanjutnya sebagai landasan hukum dan pedoman dalam melakukan pemungutan pajak daerah oleh Pemerintah kota Pekanbaru, maka ditetapkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Diperlukan adanya pengetahuan dan pemahaman yang memadai dari masyarakat sebagai wajib pajak terhadap peraturan pelaksanaan PBB yang berlaku, karena selama ini sistem pemungutan PBB dilakukan dengan cara Official Assessment System, yaitu memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang yang harus dibayar oleh wajib pajak. Sehingga, penggunaan Official Assessment System mengakibatkan kurangnya pemahaman wajib pajak tentang peraturan pelaksanaan PBB karena

masyarakat hanya bisa menerima Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dan berkewajiban membayarnya (Rini Khairiah: 2009).

Berikut penerimaan PBB di Kecamatan Marpoyan Damai periode 2008-2012:

Tabel 1.1

Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Marpoyan Damai

Tahun	Target (Rp)	Realisasi		
		Penerimaan (Rp)	Sisa (Rp)	Efektivitas Penerimaan (%)
2008	4.659.838.000	3.557.820.752	(1.102.017.248)	76,35
2009	5.823.611.442	4.960.849.616	(862.761.826)	85,18
2010	6.051.389.045	5.005.419.778	(1.045.969.267)	82,71
2011	5.917.777.786	6.498.547.226	580.769.440	109,81
2012	7.702.318.877	5.776.739.158	(1.925.579.719)	75,00

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

Berdasarkan pada tabel diatas bisa dilihat selama lima tahun terakhir (periode 2008-2012) hanya ada satu tahun dimana realisasi penerimaan PBB mencapai target yaitu pada tahun 2011. Pada periode 2008 realisasi penerimaan PBB sebesar 76,35%, periode 2009 sebesar 85,18%, periode 2010 sebesar 82,71%, periode 2011 mengalami pencapaian yang sangat memuaskan yaitu sebesar 109,81%, tetapi pada tahun 2012 penerimaan mengalami penurunan drastis, yaitu sebesar 75%.

Agar bisa meningkatkan peran serta masyarakat sebagai subjek pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, upaya pemerintah untuk membudayakan pajak sangat dibutuhkan, sehingga masyarakat Indonesia menjadi sadar dan peduli pajak. Tanpa pengetahuan dan pemahaman yang mendasar tentang pajak, wajib pajak tidak akan merespon adanya kebutuhan dana pembangunan yang berasal dari pajak, mereka tidak akan melakukan hak dan kewajiban pajaknya menurut prosedur dan sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. Pemahaman yang mendalam terhadap peraturan pelaksanaan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak perseorangan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak dari tahun ke tahun.

Penelitian yang dilakukan oleh Pancawati Hardiningsih dan Nila Yulianawati (2011) yang meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak. Semakin tinggi kesadaran yang dimiliki wajib pajak maka semakin meningkatkan kemauan membayar kewajiban perpajakan.

Penelitian lain dilakukan oleh Rini Kairiah (2009) meneliti tentang tingkat pemahaman wajib pajak mengenai peraturan pelaksanaan PBB dan pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak di Kecamatan Guguk Kabupaten 50 Kota. Hasil penelitiannya menunjukkan sikap positif terhadap peraturan pelaksanaan PBB. Pemahaman wajib pajak mengenai peraturan pelaksanaan PBB berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Agus Nugroho Jatmiko (2006) yang meneliti pengaruh sikap wajib pajak pada pelaksanaan sanksi denda, pelayanan fiskus dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sikap WP terhadap pelaksanaan sanksi denda, pelayanan fiskus dan kesadaran perpajakan secara parsial memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan WP.

Merujuk pada hasil penelitian sebelumnya, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang : **“Analisis Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Mengenai Peraturan Pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pengaruhnya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kecamatan Marpoyan Damai ”**.

1.2 Perumusan Masalah

Sesuai dengan judul dari penelitian ini, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

“Apakah tingkat pemahaman wajib pajak mengenai peraturan pelaksanaan PBB mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak”.

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mendapatkan bukti empiris tentang tingkat pemahaman wajib pajak orang pribadi terhadap peraturan pelaksanaan PBB di Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru.

2. Untuk mengetahui apakah pemahaman wajib pajak mengenai peraturan pelaksanaan PBB mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Kecamatan Marpoyan Damai.
3. Untuk mengetahui prosedur perhitungan PBB.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Penulis

Agar dapat mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh dari bangku perkuliahan dan untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi.

2. Bagi Aparat Perpajakan di Kecamatan Marpoyan Damai

Untuk memperoleh informasi mengenai tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya melalui pemahaman wajib pajak orang pribadi terhadap peraturan pelaksanaan PBB dan untuk dijadikan sebagai bahan masukan guna mengambil langkah-langkah selanjutnya seperti agar lebih meningkatkan pelayanan atau penyuluhan pajak kepada masyarakat.

3. Bagi kalangan akademisi dan pendidikan

Untuk memperluas pengetahuan dan penelitian di bidang perpajakan di bidang PBB dan dapat dijadikan bahan referensi bagi peneliti yang berminat dalam kasus serupa.

1.5 Pembatasan Masalah

Agar penelitian tepat sasaran sesuai dengan permasalahan di atas, maka penulis melakukan pembatasan sebagai berikut :

1. Pajak yang akan dibahas adalah Pajak Bumi dan Bangunan.
2. Penelitian terhadap pengaruh pemahaman terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak mengenai peraturan pelaksanaan PBB, dilakukan hanya dengan melalui kuesioner yang disebarakan kepada responden penelitian.
3. Penelitian ini akan menggunakan sampel wajib pajak orang pribadi yang mempunyai, memiliki, menguasai dan memperoleh hak atas tanah dan bangunan yang biasanya melakukan pembayaran PBB terutang.

1.6 Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penulisan ini secara keseluruhan akan dibagi ke dalam lima bab, sebagai berikut:

Bab satu, merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, pembatasan masalah dan sistematika pembahasan.

Bab dua, merupakan telaah pustaka, yang menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan Pajak Bumi dan Bangunan seperti pengertian PBB, subjek pajak, wajib pajak dan objek PBB (meliputi subjek pajak dan wajib pajak, objek pajak PBB, nilai jual objek pajak, nilai jual objek pajak tidak kena pajak, dasar

pengenaan NJOP,NJKP, klasifikasi dan cara menghitung pajak terhutang), pengurangan PBB, pengalihan PBB dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, dan pajak dalam perspektif islam,kepatuhan wajib pajak serta pemahaman wajib pajak mengenai peraturan pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan, kemudian diakhiri dengan definisi operasional variabel.

Bab tiga, merupakan metodologi penelitian yang digunakan untuk mendukung penelitian ini yang terdiri dari desain penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, populasi, sampling dan metode pengambilan sampling, identifikasi dan pengukuran variabel, kerangka pemikiran, teknik pengujian instrumen, metode analisis data dan diakhiri dengan pengujian hipotesis.

Bab empat, bagian ini akan menguraikan pengujian hipotesis dan pembahasan hasil analisis data.

Bab lima, merupakan bab penutup yang meliputi kesimpulan, keterbatasan penelitian yang telah dilakukan, dan saran.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak kebendaan atas bumi dan bangunan yang dikenakan terhadap orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai hak atau memiliki, menguasai, memperoleh manfaat atas bangunan (Undang-undang No. 12 tahun 1984 dan Undang-undang No.12 tahun 1994).

Menurut Pasal 1 UU Pajak Bumi dan Bangunan, bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang dibawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa, tambak, perairan serta laut wilayah Republik Indonesia). Sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau yang dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan yang diperuntukkan sebagai tempat tinggal atau tempat usaha, atau tempat yang dapat diusahakan (jalan lingkungan dalam satu kesatuan dengan komplek bangunan, jalan tol, kolam renang, pagar mewah, tempat olahraga, galangan kapal, dermaga, taman mewah, tempat penampungan/ kilang minyak, air dan gas, pipa minyak, fasilitas lain yang memberikan manfaat) (Mardiasmo 2011 :311-312).

2.1.1 Sejarah Pajak Bumi dan Bangunan

Pada zaman penjajahan, pajak yang dikenakan adalah terhadap tanah yang disebut pajak tanah. Setelah kemerdekaan pajak tanah tersebut ditukar namanya menjadi pajak bumi, hal ini terlihat dari Rencana Undang-undang tentang penggantian pajak bumi dan pajak pendapatan yang realisasinya termuat dalam

Undang-Undang No.1 tahun 1949. Tetapi, Undang-undang ini gagal diterapkan dengan baik, sehingga dikeluarkanlah Undang-undang Pajak Hasil Bumi tahun 1959 yang merupakan Undang-undang pajak bumi pertama yang berlaku secara seragam di Indonesia. Dimana tarif tunggal ditetapkan sebesar 5% dari rata-rata hasil bersih setahun dan kemudian atas usul dari daerah ditingkatkan menjadi 10%. Objek pajak hasil bumi ini adalah semua tanah atas nama, berlaku hak kebendaan. Jika tanah tersebut tidak dikenai pajak tanah maka dikenakan pajak *vervonding*.

Petugas pemungut pajak diberi upah pungut sebesar 10%. Dalam rangka intensifikasi pemungutan pajak atas dasar intruksi bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan tahun 1965, maka pemungut pajak yang semula adalah kepala desa digantikan dengan tim yang terdiri dari Pamong Desa, Pamong Praja dan unsur Pajak Hasil Bumi.

Namun pada akhir tahun 1965 Pajak Hasil Bumi dirubah menjadi Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) dengan Keputusan Presidium Kabinet RI No.91/U/Kep/4/1967 IPEDA berkembang secara resmi, tetapi tidak secara legal berdasarkan Undang-undang Perpajakan. Karena Undang-undang Pajak Hasil Bumi ini sebagai dasar hukum kurang mendukung perluasan objek IPEDA, maka terasa sekali perlunya pembaharuan Undang-undang Perpajakan sehingga keluarlah Keputusan Presiden RI No.12 tahun 1967 yang mengalihkan penanganan IPEDA dari Direktorat Jenderal Keuangan kepada Direktorat Jenderal Pajak.

Sesuai dengan amanat yang terkandung pada Garis-garis Besar Haluan Negara tahun 1983, maka dilakukan pembaharuan sistem perpajakan nasional atau *tax reform* yaitu pembaharuan dan penyatuan format per undang-undang perpajakan. Setelah *tax reform* maka lahirlah Undang-undang No.12 tahun 1985 tentang PBB dan kemudian diubah menjadi Undang-undang No.12 tahun 1994.

Sejak diberlakukan Undang-undang No.12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan di wilayah Indonesia, maka diputuskan dicabut semua Undang-undang tentang usaha penyederhanaan pemungutan pajak agar tidak terjadi pemungutan pajak atas objek menjadi ganda. Jenis pajak yang dicabut adalah :

1. Ordonansi Pajak Rumah Tangga 1908
2. Ordonansi Verponding Indonesia 1923
3. Ordonansi Verponding 1928
4. Ordonansi Pajak Kekayaan 1932
5. Ordonansi Pajak Jalan 1942
6. Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA)
7. Pajak-pajak lain dipungut oleh pemerintah daerah yang objeknya berupa harta tidak bergerak.

Dengan demikian, sejak diberlakukannya Undang-undang Pajak Bumi dan Bangunan tersebut maka pungutan pajak berganda atas bumi dan bangunan dapat dihindarkan. Semua pajak yang dihapus ini disatukan dan dinamakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

2.1.2 Sifat Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan mempunyai sifat kebendaan (objektif), yaitu besarnya pajak ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/ tanah dan bangunan, misalnya berupa sawah, ladang, kebun, pekarangan dan pertambangan serta ditentukan dari nilai kualitas dan kuantitas dari bangunan yang berdiri di atas tanah tersebut. PBB dikenakan setiap tahun dan dikeluarkan SPPT yang merupakan pajak langsung yang pajaknya harus dipikul sendiri oleh wajib pajak, seperti yang tercantum pada SKP dan tidak dapat dilimpahkan pada orang lain.

2.1.3 Subjek Pajak, Wajib Pajak dan Objek Pajak PBB

2.1.3.1 Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Subjek Pajak PBB (Pasal 4 ayat 1 Undang-undang No.12 tahun 1994 dan Anastasia Diana : 2009, hal 713) adalah:

Orang atau Badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.

Sedangkan pada ayat 2 nya disebutkan bahwa:

Subjek pajak sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) yang dikenakan kewajiban membayar pajak menjadi wajib pajak PBB.

1. Yang menjadi subjek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan atau memperoleh manfaat atas bumi, dan atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat

atas bangunan. Dengan demikian tanda pembayaran/ pelunasan pajak bukan merupakan bukti pemilikan hak.

2. Subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam no.1 yang dikenakan kewajiban membayar pajak menjadi wajib pajak. Orang atau badan yang berkedudukan sebagai subjek pajak belum tentu yang bersangkutan menjadi wajib pajak, tetapi orang atau badan yang menjadi wajib pajak maka yang bersangkutan secara otomatis telah menjadi subjek pajak karena pada dasarnya penentuan objek pajak PBB adalah azas manfaat, bukan atas azas pemilikan.
3. Dalam hal atas suatu objek pajak belum jelas diketahui wajib pajaknya, Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam no.1 sebagai wajib pajak.

Hal ini berarti memberikan kewenangan kepada Dirjen Pajak untuk menentukan subjek wajib pajak, apabila suatu objek pajak belum jelas wajib pajaknya.

Untuk lebih jelasnya diberikan contoh sebagai berikut :

1. Subjek Pajak X memanfaatkan atau menggunakan bumi dan atau bangunan milik Y bukan karena sesuatu hak berdasarkan undang-undang atau bukan karena perjanjian, maka X yang memanfaatkan/ menggunakan bumi dan atau bangunan ditetapkan sebagai wajib pajak.
2. Suatu objek pajak yang masih dalam sengketa pemilikan di pengadilan, maka orang atau badan yang memanfaatkan/ menggunakan objek pajak tersebut ditetapkan sebagai wajib pajak.

3. Subjek pajak dalam waktu yang lama berada di luar wilayah letak objek pajak, sedang untuk merawat objek pajak tersebut dikuasakan kepada orang atau badan, maka orang atau badan yang diberi kuasa dapat ditunjuk sebagai wajib pajak. Penunjukan sebagai wajib pajak oleh Dirjen Pajak bukan merupakan bukti pemilikan hak.
4. Subjek pajak yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam no.3 dapat memberikan keterangan secara tertulis kepada Dirjen Pajak bahwa ia bukan wajib pajak terhadap objek pajak dimaksud.
5. Bila keterangan yang diajukan oleh wajib pajak dalam no.4 disetujui, maka Dirjen Pajak membatalkan penetapan sebagai wajib pajak sebagaimana dalam no.3 dalam jangka waktu satu bulan sejak diterimanya surat keterangan dimaksud.
6. Bila keterangan yang diajukan itu tidak disetujui, maka Dirjen Pajak mengeluarkan surat keputusan penolakan dengan disertai alasan-alasannya.
7. Apabila setelah jangka waktu satu bulan sejak tanggal diterimanya keterangan sebagaimana no.4 Dirjen Pajak tidak memberikan keputusan, maka keterangan yang diajukan itu dianggap disetujui.
8. Apabila Dirjen Pajak tidak memberikan keputusan dalam waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya keterangan dari wajib pajak, maka ditetapkan sebagai wajib pajak gugur dengan sendirinya dan berhak mendapatkan keputusan pencabutan penetapan sebagai wajib pajak.

2.1.3.2 Objek PBB

Menurut pasal 1 ayat 3 Undang-undang Pajak Bumi dan Bangunan No.12 tahun 1994 ditetapkan bahwa yang menjadi objek pajak adalah bumi dan atau bangunan. Selain itu termasuk juga unit tempat usaha, perumahan dan apartemen, seperti tercantum dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Tentang Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi Melalui Pendataan Objek Pajak Bumi dan Bangunan. Ekstensifikasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kepada WP OP.

Untuk memudahkan perhitungan pajak yang terutang, maka objek pajak bumi/ tanah diklasifikasikan. Klasifikasi bumi dan bangunan adalah pengelompokkan bumi dan bangunan menurut nilai jualnya. Dalam menentukan klasifikasi bumi/ tanah faktor-faktor yang diperhatikan adalah letak, peruntukan, pemanfaatan, kondisi lingkungan dan lain-lain. Dalam menentukan klasifikasi bangunan harus diperhatikan bahan yang digunakan, rekayasa, letak, kondisi lingkungan dan lain-lain(Mardiasmo 2011 :313).

Objek pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan bangunan (Undang-undang PBB No.12 Tahun 1994 pasal 3 ayat 1) :

- a. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum tidak untuk mencari keuntungan.
- b. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu.

- c. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak.
- d. Digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan azas perlakuan timbal balik.
- e. Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan (Mardiasmo 2011 : 313-314).

2.1.3.3 Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti. (Anastasia Diana, Lilis Setiawati : 2009, hal 712 dan Mardiasmo : 2011, hal 312-313).

- a. Perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, adalah suatu pendekatan/ metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara membandingkannya dengan objek pajak lain yang sejenis yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya.
- b. Nilai perolehan baru, adalah suatu pendekatan/ metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh objek tersebut pada saat penilaian dilakukan, yang dikurangi dengan penyusutan berdasarkan kondisi fisik objek tersebut.

- c. Nilai jual pengganti, adalah suatu pendekatan/ metode penentuan nilai jual suatu objek pajak yang berdasarkan pada hasil produksi objek pajak tersebut.

2.1.3.4 Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP)

Untuk setiap wajib pajak diberikan Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP). Apabila seorang wajib pajak mempunyai beberapa objek pajak, yang diberikan NJOPTKP hanya salah satu objek pajak yang nilainya terbesar, sedangkan objek pajak lainnya tetap dikenakan secara penuh tanpa dikurangi NJOPTKP.

Sesuai pasal 3 ayat 1 Undang-undang No.12 tahun 1984 tentang Pajak Bumi dan Bangunan bahwa besarnya Nilai Objek Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk setiap wajib pajak. Mengacu pada pasal 3 ayat 4 Undang-undang PBB bahwa penyesuaian besarnya NJOPTKP ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

2.1.3.5 Dasar Pengenaan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), Nilai Jual Kena Pajak (NJKP), Klasifikasi dan Cara Menghitung Pajak Terutang

Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Jual Objek Pajak (Pasal 6 ayat 1 Undang-undang PBB). Besarnya NJOP ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, kecuali untuk daerah tertentu ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan daerahnya (Anastasia Diana, Lilis Setiawati 2009:718). Untuk daerah tertentu yang karena perkembangan pembangunan

mengakibatkan kenaikan NJOP yang cukup besar, maka nilai jual ditetapkan setahun sekali (Mardiasmo 2011: 317). Dasar penghitungan pajak adalah yang ditetapkan serendah-rendahnya 20% dan setinggi-tingginya 100% dari NJOP. Besarnya persentase ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dengan memperhatikan kondisi ekonomi nasional.

Untuk perekonomian sekarang ini, terutama untuk tidak terlalu membebani wajib pajak di daerah pedesaan, tetapi dengan tetap memperhatikan penerimaan, khususnya bagi Pemerintah Daerah, maka telah ditetapkan besarnya persentase untuk menentukan besarnya NJKP (Mardiasmo 2011 :318), yaitu:

1) Sebesar 40% dari Nilai Jual Objek Pajak :

Objek pajak perkebunan, objek pajak kehutanan, dan objek pajak lainnya yang wajib pajaknya perorangan dengan NJOP atas bumi dan bangunan sama atau lebih besar dari Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

2) Sebesar 20% dari Nilai Jual Objek Pajak :

Objek pajak pertambangan, dan objek pajak lainnya yang NJOP-nya kurang dari Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

2.1.3.6 Tarif Pajak Bumi dan Bangunan

Tarif PBB yang dikenakan atas objek PBB adalah sebesar 0,5% (lima per sepuluh persen). Tarif PBB yang besarnya 0,5% adalah *flat rate*, tarif proporsional yang persentasenya tetap, tidak berubah-ubah (Mardiasmo 2011:317). Tarif tersebut berlaku secara menyeluruh terhadap objek pajak sejenis apapun diseluruh

wilayah Indonesia. Tarif ini mencerminkan wujud kesederhanaan, kemudahan pelaksanaan oleh aparatatur perpajakan (fiskus). Tetapi walaupun persentasenya tetap, namun besar pajaknya akan berbeda, tergantung pada besar kecilnya NJOP .

Cara menghitung PBB terutang adalah sebagai berikut :

Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan NJKP.

PBB terutang = Tarif pajak x NJKP

$$= 0,5\% \times [\text{Persentase NJKP} \times (\text{NJOP} - \text{NJOPTKP})]$$

Contoh perhitungan PBB:

Wajib pajak A mempunyai sebidang tanah dan bangunan yang NJOP-nya Rp 20.000.000,00 dan NJOPTKP untuk daerah tersebut Rp 12.000.000,00, maka besarnya pajak yang terutang adalah :

$$= 0,5\% \times 20\% \times (\text{Rp } 20.000.000,00 - \text{Rp } 12.000.000,00)$$

$$= \text{Rp } 8.000,00$$

2.1.4 Tahun Pajak, Saat dan Tempat yang Menentukan Pajak Terutang

Tahun pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender, yaitu dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Saat yang menentukan pajak terutang adalah menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari. Oleh karena tahun pajak dimulai pada tanggal 1 Januari, maka keadaan objek pajak pada tanggal tersebut merupakan saat yang menentukan pajak yang terutang.

Contoh :

- a. Objek pajak pada tanggal 1 Januari 2009 berupa tanah dan bangunan. Pada tanggal 10 Januari 1986 bangunannya terbakar, maka pajak yang terutang tetap berdasarkan keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari 2009, yaitu keadaan sebelum bangunan itu terbakar.
- b. Objek pajak pada tanggal 1 Januari 2009 berupa sebidang tanah tanpa bangunan di atasnya. Pada tanggal 20 Agustus 2009 dilakukan pendataan, ternyata di atas tanah tersebut telah berdiri suatu bangunan, maka pajak yang terutang untuk tahun 1986 tetap dikenakan berdasarkan keadaan pada tanggal 1 Januari 2009. Sedangkan bangunannya baru akan dikenakan pada tahun 2010 (Anastasia Diana, Lilis Setiawati 2009:720).

2.1.5 Pendaftaran, Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP), Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), dan Surat Ketetapan Pajak (SKP)

Dalam rangka pendataan, subjek pajak wajib mendaftarkan objek pajaknya dengan mengisi SPOP. Wajib pajak akan diberikan SPOP untuk diisi dan dikembalikan kepada Direktorat Jenderal Pajak (Mardiasmo 2011:319).

SPOP merupakan bentuk kerja sama dari subjek pajak dengan administrasi pajak yang pada pajak-pajak lainnya disebut Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT). SPOP harus diisi dengan jelas, benar, lengkap dan tepat waktu serta ditandatangani dan disampaikan kepada Dirjen Pajak yang wilayah kerjanya

meliputi letak objek pajak selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya SPOP oleh subjek pajak (pasal 9 ayat 2 UU PBB).

Jelas dimaksudkan agar penulisan data yang diminta dalam SPOP dibuat sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan salah tafsir yang dapat merugikan negara maupun wajib pajak sendiri.

Benar, berarti data yang dilaporkan harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, seperti luas tanah dan atau bangunan, tahun dan harga perolehan dan seterusnya sesuai dengan kolom-kolom/ pertanyaan yang ada pada SPOP.

SPOP hanya diberikan dalam hal:

1. Objek pajak belum terdaftar/ data belum lengkap;
2. Objek pajak telah terdaftar tetapi data belum lengkap;
3. NJOP berubah/ pertumbuhan ekonomi;
4. Objek pajak dimutasikan/ laporan dari instansi yang berkaitan langsung dengan objek pajak.

Dirjen pajak akan menerbitkan SPPT berdasarkan SPOP yang diterimanya. SPPT diterbitkan atas dasar SPOP, namun untuk membantu wajib pajak SPPT dapat diterbitkan berdasarkan data objek pajak yang telah ada pada Dirjen Pajak. Dirjen Pajak dapat mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Apabila SPOP tidak disampaikan dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran.

- b. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang (seharusnya) lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh wajib pajak (Mardiasmo 2011: 320)

Sanksi administrasi yang dikenakan terhadap wajib pajak yang tidak menyampaikan SPOP, dikenakan sanksi sebagai tambahan terhadap pokok pajak yaitu sebesar 25% dari pokok pajak.

SKP ini berdasarkan data yang ada pada Dirjen Pajak memuat penetapan objek pajak dan besarnya pajak yang terutang beserta denda administrasi yang dikenakan kepada wajib pajak.

Contoh :

Wajib pajak A tidak menyampaikan SPOP. Berdasarkan data yang ada, Dirjen Pajak mengeluarkan SKPKB yang berisi:

Objek pajak dengan luas dan nilai jual

Luas objek pajak menurut SPOP

Pokok pajak	Rp 2.000.000,00
-------------	-----------------

Sanksi administrasi :

25% x Rp 2.000.000,00	<u>Rp 500.000,00</u>
-----------------------	----------------------

Jumlah pajak yang terutang dalam SKP	Rp 2.500.000,00
--------------------------------------	-----------------

2.1.6 Tata Cara, Jatuh Tempo, Pembayaran dan Penagihan PBB

Pajak yang terutang berdasarkan SPPT harus dilunasi selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak (pasal 11 ayat 1 UU PBB) (Mardiasmo 2011:324).

Denda administrasi dan pokok pajak ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Pajak (STP) yang harus dilunasi dalam satu bulan sejak tanggal diterimanya STP tersebut. Sedangkan pajak yang terutang berdasarkan SKP harus dilunasi selambat-lambatnya 1 bulan sejak tanggal diterimanya SKP oleh wajib pajak.

Pajak yang terutang yang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang dibayar, dikenakan denda administrasi sebesar 2% (dua persen) sebulan, yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Contoh :

SPPT tahun pajak 2012 diterima oleh wajib pajak pada tanggal 1 Maret 2012 dengan pajak yang terutang sebesar Rp 100.000,00. Oleh wajib pajak baru dibayar pada tanggal 1 September 2012. Maka terhadap wajib pajak tersebut dikenakan denda administrasi sebesar 2%, yaitu : $2\% \times \text{Rp } 100.000,00 = \text{Rp } 2.000,00$.

Pajak terutang yang harus dibayar pada tanggal 1 September 2012 adalah:

Pokok pajak + denda administrasi = Rp 100.000,00 + Rp 2.000,00 = Rp 102.000,00.

Bila wajib pajak tersebut baru membayar hutang pajaknya pada tanggal 10 Oktober 2012, maka terhadap wajib pajak tersebut dikenakan denda $2 \times 2\%$ dari pokok pajak, yaitu $4\% \times \text{Rp } 100.000,00 = \text{Rp } 4.000,00$.

Pajak yang terutang yang harus dibayar pada tanggal 10 Oktober 2012 adalah: **Pokok pajak + denda administrasi = Rp 100.000,00 + Rp 4.000,00 = Rp 104.000,00.**

Denda administrasi tersebut ditambah dengan hutang pajak yang belum atau kurang bayar ditagih dengan Surat Tagihan Pajak yang harus dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya Surat Tagihan Pajak oleh wajib pajak.

Pajak yang terutang dapat dibayar di Bank, Kantor Pos dan tempat lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

2.1.7 Kewajiban dan Hak Wajib Pajak PBB

2.1.7.1 Kewajiban Wajib Pajak PBB

1. Mendaftarkan objek pajaknya dengan mengisi Surat Pemberitahuan Objek Pajak.
2. Mengisi Surat Pemberitahuan Objek Pajak dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Direktorat

Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak, selambat-lambatnya 30 hari setelah diterimanya SPOP.

3. Melunasi PBB yang terutang selambat-lambatnya 6 bulan sejak diterimanya SPPT.
4. Melunasi pajak yang terutang selambat-lambatnya 1 bulan sejak diterimanya SKP.
5. Melunasi pajak yang terutang pada saat jatuh tempo tidak dibayar disertai dengan denda administrasi 2% sebulan, yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 bulan.

2.1.7.2 Hak Wajib Pajak

1. Mengajukan keberatan atas besarnya pajak terutang yang dicantumkan pada Surat Pemberitahuan Pajak Terutang dan Surat Ketetapan Pajak.
2. Mengajukan pengurangan atas besarnya pajak terutang.

2.1.8 Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan

Pengurangan diberikan atas PBB terutang yang tercantum dalam SPPT atau SKP. Pengurangan pajak terutang dapat diberikan kepada dan dalam hal (Mardiasmo 2011 :329-332) :

1. WP Orang Pribadi atau Badan karena kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan atau karena sebab-sebab tertentu lainnya. Dalam hal ini pengurangan dapat diberikan setinggi-tingginya 75% dari besarnya pajak terutang, dan ditetapkan berdasarkan pertimbangan kondisi objek pajak serta penghasilan wajib pajak.

2. WP orang pribadi atau badan dalam hal objek pajak yang terkena bencana alam/ sebab-sebab lain yang luar biasa. Dalam hal ini diberikan sampai dengan 100% (seratus persen) dari besarnya pajak terutang.
3. Wajib pajak anggota veteran pejuang kemerdekaan dan veteran pembela kemerdekaan. Besarnya pengurangan yang ditetapkan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari besarnya pajak terutang.

2.1.9 Keberatan dan Banding

2.1.9.1 Keberatan

Wajib pajak dapat mengajukan keberatan pada Direktur Jenderal Pajak atas:

1. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT); dan
2. Surat Ketetapan Pajak (SKP).

Keberatan terhadap SPPT dan SKP harus diajukan masing-masing dalam satu Surat keberatan tersendiri untuk setiap tahun pajak.

Wajib pajak dapat mengajukan keberatan atas SPPT atau SKP dalam hal :

1. Wajib pajak menganggap luas objek bumi dan bangunan, klasifikasi atau Nilai Jual Objek Bumi dan Bangunan yang tercantum dalam SPPT atau SKP tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
2. Terdapat perbedaan penafsiran Undang-undang dan peraturan perundang-undangan antar wajib pajak dan fiskus.

2.1.9.2 Banding

Apabila wajib pajak tidak puas atau tidak dapat menerima keputusan atas surat keberatan yang diajukannya, wajib pajak dapat mengajukan banding kepada badan peradilan pajak terhadap Keputusan Keberatan.

Tata Cara Penyelesaian Banding

- a. Wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan.
- b. Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan pengadilan khusus di lingkungan peradilan tata usaha negara.
- c. Permohonan banding diajukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Keputusan Keberatan diterima, dengan cara :
 1. Tertulis dalam bahasa Indonesia;
 2. Mengemukakan alasan-alasan yang jelas;
 3. Melampirkan salinan Surat Keputusan Keberatan.
- d. Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan banding belum merupakan pajak yang terutang sampai dengan Putusan Banding diterbitkan.
- e. Apabila permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan

- f. Apabila pengajuan keberatan atau banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak, kelebihan pembayaran tersebut dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dengan ketentuan sebagai berikut:
- Untuk Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dihitung sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan, putusan banding
 - Untuk Surat Ketetapan Pajak Nihil dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar dihitung sejak tanggal penerbitan surat ketetapan pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding.

2.1.10 Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah

Pemerintah membuat kebijakan baru yang telah diatur di dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memuat tentang pengalihan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang merupakan suatu bentuk tindak lanjut kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Dengan pengalihan ini maka kegiatan proses pendataan, penilaian, penetapan, pengadministrasian, pemungutan/penagihan dan pelayanan PBB-P2 akan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota).

2.1.10.1 Tugas Para Pihak dalam Pengelolaan PBB

Pihak-pihak yang berperan dalam persiapan pengalihan PBB-P2 seperti tercantum pada Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri adalah Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Pemerintah Daerah. Tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak dijabarkan sebagai berikut:

1. Pemerintah Pusat (DJP dan DJPK)

Tugas dan tanggung jawab Pemerintah Pusat dipikul bersama oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK). DJP bertugas dan bertanggung jawab dalam memberikan Pemerintah Daerah hasil kompilasi berupa:

- a. Peraturan Pelaksanaan PBB-P2.
- b. Standard Operating Procedure (SOP) terkait PBB-P2.
- c. Struktur, tugas, dan fungsi organisasi Direktorat Jenderal Pajak terkait pemungutan PBB-P2.
- d. Data piutang PBB-P2 beserta data pendukungnya.
- e. SK Menkeu mengenai Nilai Jual Objek Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) yang berlaku dalam kurun waktu 10 tahun sebelum tahun pengalihan.
- f. Salinan Peta Desa/Kelurahan, Peta Blok, dan Peta Zona Nilai Tanah dalam bentuk softcopy.
- g. Salinan basis data PBB-P2 sebelum Tahun Pengalihan.

- h. Salinan Sistem Aplikasi terkait PBB-P2 beserta source code-nya.

Terkait dengan tugas dan tanggung jawab DJP tersebut, DJP telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Menyampaikan salinan Peraturan PBB-P2.
- b. Menyampaikan Standard Operating Procedures Pengelolaan PBB-P2.
- c. Menyampaikan Struktur, Tugas dan Fungsi Pengelolaan PBB-P2.
- d. Menyampaikan Data Tunggal PBB-P2.
- e. Menyampaikan Data NJOP, NJOPTKP, NPOPTKP, Peta, SISMIOP.
- f. Aplikasi SISMIOP dan sourcecode.
- g. Sosialisasi ke Stakeholder (Wajib Pajak, Kantor Pertanahan, Kantor Lelang, Bank, Pemerintah Daerah).
- h. Asistensi ke Pemerintah Daerah.

Tugas dan tanggung jawab DJPK adalah:

- a. Menggandakan hasil kompilasi tersebut untuk kemudian diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
- b. Melakukan pemantauan dan pembinaan pelaksanaan pengalihan kewenangan pemungutan PBB-P2 ke Pemerintah Daerah.

2. Kementerian Dalam Negeri

Tugas dan tanggung jawab Kementerian Dalam Negeri dilaksanakan bersama oleh Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Keuangan Daerah, dan

Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri. Tugas dan tanggung jawab tersebut dilakukan dalam bentuk:

- a. Penyiapan pedoman struktur organisasi dan tata kerja pemerintah daerah.
- b. Pemberian bimbingan, konsultasi, pendidikan dan pelatihan teknis.
- c. Pelaksanaan supervisi dalam rangka pengalihan kewenangan pemungutan PBB-P2.

3. Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah bertugas dan bertanggung jawab menyiapkan:

- a. Sarana dan prasarana.
- b. Struktur organisasi dan tata kerja.
- c. Sumber daya manusia.
- d. Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan SOP.
- e. Kerja sama dengan pihak terkait, antara lain, Kantor Pelayanan Pajak, perbankan, Kantor Pertanahan, dan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah.
- f. Pembukaan rekening penerimaan PBB-P2 pada bank yang sehat.

Sehubungan dengan persiapan tersebut, Pemerintah Daerah dapat mengadopsi beberapa hal dimiliki dan telah dilakukan oleh Pemerintah Pusat (DJP) sebagai berikut:

- a. Sistem administrasi PBB (pendataan, penilaian, penetapan, pengadministrasian, pemungutan/penagihan dan pelayanan).
- b. Kebijakan/peraturan dan SOP pelayanan.
- c. Peningkatan keahlian Sumber Daya Manusia (Aparatur) melalui pelatihan.
- d. Sistem manajemen informasi objek pajak.

2.1.10.2 Implikasi Sosial dan Ekonomi

Peralihan PBB dari pajak pusat menjadi pajak daerah mempunyai implikasi sosial dan ekonomi sebagai berikut:

- 1. Menjamin ketersediaan anggaran untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan modal dan sarana transportasi umum.
- 2. Meningkatkan kepastian hukum.
- 3. Meningkatkan pelayanan publik, dengan syarat masyarakat tidak dipungut secara berlebihan.
- 4. Menciptakan iklim investasi yang kondusif (business friendly).

Agar terciptanya kelancaran dalam pengelolaan PBB-P2, pemerintah kabupaten/kota harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Kebijakan NJOP agar memperhatikan konsistensi, kesinambungan dan keseimbangan antar wilayah
- 2. Kebijakan tarif PBB, agar tidak menimbulkan gejolak di masyarakat

3. Menjaga kualitas pelayanan kepada WP, dan
4. Akurasi data subjek dan objek pajak dalam SPPT tetap terjaga

2.1.11 Pajak dalam Perspektif Islam

2.1.11.1 Landasan Kewajiban Membayar Pajak

Di dalam hukum Islam, dasar membayar pajak itu hukumnya adalah wajib, berdasarkan pada ayat Al-Qur'an Surat At-Taubah : 29, yang berbunyi:

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ
وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا
الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿٢٩﴾

"Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula kepada hari kemudian dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (Agama Allah), yaitu orang-orang yang diberi Al-kitab kepada mereka, sampai mereka membayar "Jizyah" dengan patuh, sedang mereka dalam keadaan tunduk".

Pembebanan kewajiban membayar pajak hanyalah terhadap kaum laki-laki dan kaum hawa yang normal, sedangkan orang yang tidak mampu, dibebaskan dari kewajiban tersebut. Pembebanannya pun disesuaikan dengan status sosial dan kondisi keuangannya.

2.1.11.2 Pengertian Pajak Menurut Syariat

Secara etimologi, pajak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah *Dharibah*, yang artinya mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebaskan, dan lain-lain.

Abdul Qadim Zallum dalam kitabnya *Al-Amwal fi Daulah al-Khilafah* berpendapat:

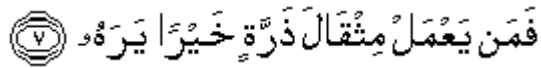
“Pajak adalah harta yang diwajibkan Allah SWT kepada kaum Muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi baitul mal tidak ada uang/ harta”.

Dalam definisi tersebut terkandung 5 (lima) unsur pokok yang merupakan unsur penting yang harus terdapat dalam ketentuan pajak menurut syariat, yaitu: Diwajibkan oleh Allah SWT, objeknya adalah harta (*al-Mal*), subjeknya kaum Muslim yang kaya (*ghaniyyum*), tujuannya untuk membiayai kebutuhan kaum muslim saja, dan diberlakukan karena adanya kondisi darurat (khusus) yang harus segera diatasi oleh Ulil Amri.

2.1.11.3 Pajak Sebagai Ibadah

Kaum Muslim sebagai pembayar pajak harus mempunyai batasan pemahaman yang jelas tentang pajak menurut pemahaman Islam, sehingga apa-apa yang dibayar memang termasuk hal-hal yang memang diperintahkan oleh Allah SWT (ibadah). Jika hal itu bukan perintah, ia tentunya tidak termasuk ibadah.

Demikian pula bagi petugas pajak, jika pajak itu sesuai syariat, maka apa yang ia lakukan tentu bernilai jihad baginya. Sebab, sekecil apapun perbuatan (kebaikan atau keburukan), pasti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT dan mendapat balasan (QS.Al-Zalzalah 99:7) :



artinya : 7.Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya.

Pembayaran pajak dapat juga dibenarkan dalam syari'at Islam karena memiliki beberapa konsideran:

1. Solidaritas sosial dan tolong menolong sesama muslim dan sesama umat manusia merupakan kewajiban. Allah berfirman dalam surat Al-maidah ayat 2, artinya: "*.....Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran*".
2. Sasaran zakat terbatas sedangkan kebutuhan negara tidak terbatas.
3. Kaidah-kaidah Umum Hukum Syara', diantaranya Masalah Mursalah.
4. Kebutuhan untuk biaya jihad dengan segala kaitannya.

Kerugian dibayar dengan keuntungan, yaitu ketika umat Islam membayar pajak, dia dapat merasakan hasil pajak tersebut lewat pembangunan dan keamanan.

2.2 Pemahaman Wajib Pajak Mengenai Peraturan Pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan Dan Pengaruhnya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

2.2.1 Kepatuhan Wajib Pajak (*tax compliance*)

Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Wajib pajak patuh merupakan wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan (Rini Khairiah:2009).

Kepatuhan pajak menurut *International Taxes Glossary* adalah tingkatan yang menunjukkan wajib pajak patuh/ tidak patuh terhadap aturan pajak di negaranya serta mengemukakan bahwa kepatuhan ditentukan oleh karakteristik-karakteristik dari figur otoritas dan kehadirannya secara fisik dipengaruhi intensitas atau tingkat kepatuhan. Tingkat kepatuhan sendiri dapat didefinisikan sebagai persepsi individu terhadap tindakan yang diperintahkan untuk dilaksanakan. (Rini Khairiah: 2009).

Kepatuhan (*compliance*) bisa dikategorikan dalam 2 hal:

a. Kepatuhan formal

Adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang

perpajakan. Misalnya: Wajib pajak memenuhi ketentuan penyampaian SPT sebelum batas waktu (*deadline*).

b. Kepatuhan material

Adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif/ hakekat memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan (Safri Nurmantu, 2005: 149)

Wajib pajak yang patuh diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu:

a. Sistem administrasi perpajakan

Sistem administrasi yang baik dan tidak menyulitkan wajib pajak dan calon wajib pajak.

b. Pelayanan pada wajib pajak

Pelayanan yang memuaskan dan tidak berbelit-belit sehingga wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban pajaknya secara efisien dan mengetahui apa saja yang harus dilakukan untuk memenuhi kewajiban pajaknya.

c. Penegakan hukum perpajakan

Memberikan sanksi kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan perpajakan, sehingga wajib pajak yang melanggar ketentuan pajak jera dan tidak mengulang perbuatannya.

d. Pemeriksaan pajak

Tindakan pengawasan oleh aparat pajak kepada wajib pajak dengan melakukan pemeriksaan pajak, sehingga wajib pajak yang melakukan pelanggaran dapat segera diketahui dan diberi sanksi.

e. Tarif pajak

Tarif pajak yang sesuai dengan pengenaan pajak yang sesungguhnya dan tidak memberatkan wajib pajak (Fidel :2010).

Wajib pajak patuh berarti wajib pajak yang mengetahui dan melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya dengan benar sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Kewajiban dan hak wajib pajak ini harus dijalankan dengan seimbang, apabila wajib pajak telah melaksanakan kewajibannya dalam perpajakan maka wajib pajak akan mendapatkan haknya.

Wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jendral Pajak sebagai wajib pajak yang memenuhi kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Keputusan menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000 tentang Kriteria Wajib Pajak yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Hal ini untuk memotivasi para wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya serta meningkatkan beberapa kriteria yang harus dipenuhi untuk menjadi wajib pajak patuh, pemerintah memberikan beberapa kriteria yang harus dipenuhi untuk menjadi wajib pajak patuh. Dasar hukum penetapan kriteria wajib pajak patuh ini adalah Undang-undang N0.16 tahun 2000 mengenai ketentuan Umum dan Tata Cara

Perpajakan, dan KMK No.554/KMK.04/2000 j.o KMK No.235/KMK.03/2003 tentang Penentuan Wajib Pajak Patuh. Adapun kriteria wajib pajak patuh yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 3 (tiga) tahun terakhir;
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran;
3. Dalam 3 (tiga) tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%;
4. Wajib Pajak yang laporan keuangannya untuk 3 tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah;
5. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir (Fidel, 2010: 53-54).

Predikat wajib pajak patuh dalam arti disiplin dan taat, tidak sama dengan wajib pajak yang berpredikat membayar pajak dalam jumlah besar, karena pembayaran pajak terbesar sekalipun belum tentu memenuhi kriteria sebagai wajib pajak patuh meskipun memberikan kontribusi besar pada negara jika masih memiliki tunggakan maupun keterlambatan penyeteroran dan pelaporan pajaknya (Muhammad Rusjdi: 2008).

2.2.2 Pemahaman Mengenai Peraturan Pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan

Pemahaman merupakan salah satu faktor Agar *official assessment system* dapat berhasil sesuai dengan yang diharapkan. Peran fiskus amatlah berarti karena pada dasarnya tingkat kepatuhan wajib pajak berdasarkan tingkat pemahaman yang baik seputar pajak.

Pengetahuan/ pemahaman adalah peringatan tentang suatu yang spesifik, universal, metode, proses-proses, pola dan struktur sumber. Peringatan tentang sesuatu melibatkan pemikiran terhadap kondisi riil. Pengetahuan dipengaruhi oleh banyak hal, antara lain faktor pendidikan formal. Pengetahuan seseorang tentang suatu objek mengandung dua aspek yaitu aspek positif dan negatif. Kedua aspek ini akan menentukan sikap seseorang, semakin banyak aspek positif makin positif terhadap objek tertentu (Husen Abdul Ghoni: 2012) .

Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada. Wajib pajak yang tidak paham akan peraturan perpajakan maka cenderung menjadi wajib pajak yang tidak taat (Pancawati Hardiningsih dan Nila Yulianawati: 2011).

Pemahaman wajib pajak atas peraturan perpajakan dapat mempengaruhi juga terhadap patuh tidaknya wajib pajak. Pemahaman ini tidak hanya memberikan pengetahuan namun juga membuat Wajib Pajak mengerti hak, kewajiban, dan sanksi apa yang menjadi kewajiban perpajakan (Riessa Roseline).

Sistem pemungutan PBB yang berlaku di Indonesia selama ini dilakukan dengan cara Official Assessment System, yaitu memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang yang harus dibayar oleh wajib pajak. Sehingga, penggunaan Official Assessment System mengakibatkan kurangnya pemahaman wajib pajak tentang sistem pemungutan PBB karena masyarakat hanya bisa menerima (SPPT) dan berkewajiban membayarnya. Dalam pelaksanaannya hal ini dapat memacu timbulnya konflik antara fiskus dengan wajib pajak.

Pertanyaannya adalah, sudahkah wajib pajak paham sepenuhnya mengenai peraturan pelaksanaan PBB, termasuk prosedur, proses penetapan, hak dan kewajiban dari wajib pajak itu sendiri serta sejauh mana pemahaman tersebut dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak? Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat. Jelas bahwa semakin paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka. Setiap wajib pajak yang telah memahami peraturan perpajakan sangat baik, biasanya akan melakukan aturan perpajakan yang ada sesuai dengan apa yang tercantum di dalam peraturan yang ada.

Sikap negatif dari wajib pajak dengan tidak memenuhi kewajiban membayar pajak maka timbullah perlawanan terhadap pajak. Perlawanan terhadap pajak dikelompokkan menjadi:

a. Perlawanan Pasif

Berupa keengganan masyarakat untuk membayar pajak, yang dapat disebabkan antara lain oleh:

1. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat yang tidak mau atau kurang memahami dan mengerti mengapa mereka harus membayar pajak dan untuk apa hasil pungutan pajak itu digunakan.
2. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami oleh masyarakat.
3. Sistem administrasi dan kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

b. Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak.

Bentuknya antara lain:

1. *Tax avoidance* (Penghindaran Pajak), merupakan cara penghematan pajak dengan memanfaatkan celah-celah perpajakan (*tax loophole*) dengan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Penghindaran pajak adalah rekayasa '*tax affairs*' yang masih tetap berada dalam bingkai ketentuan perpajakan (Erly Suandy 2008: 7).

Misalnya dengan memasukkan tunjangan pajak ke dalam penghasilan karyawan sehingga dapat dijadikan sebagai biaya untuk mengurangi penghasilan kena pajak perusahaan.

2. *Tax evasion* (Penyelundupan Pajak), merupakan cara penghindaran kewajiban perpajakan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan perundang-undangan perpajakan. Misalnya dengan memalsukan atau menghilangkan atau merubah bukti-bukti transaksi yang terjadi dalam perusahaan.

Kedua strategi tersebut merupakan kegiatan yang ilegal bilamana transaksi dilakukan semata-mata untuk tujuan penghindaran pajak dan tidak mempunyai tujuan bisnis yang baik. Pemahaman wajib pajak terhadap undang-undang dan peraturan perpajakan PBB berfungsi penting. Karena hal ini merupakan elemen dari sikap wajib pajak terhadap undang-undang dan peraturan perpajakan PBB, dan sikap wajib pajak mempengaruhi perilaku perpajakan wajib pajak, dan akhirnya perilaku perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Apabila masyarakat wajib pajak telah mampu memahami peraturan-peraturan perpajakan serta mengerti akan arti dan fungsi pajak, maka masyarakat menjadi sadar akan pajak (*tax consciousness*) yang akan menimbulkan hasrat dan keikhlasan untuk membayar pajak akan terealisasi dengan perbuatan aktif, yaitu membayar pajak pada waktunya dan sesuai dengan jumlah yang terhutang (*tax disciplinary*). Pemahaman yang mendalam terhadap peraturan pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak (Rini Khairiah 2009:56).

Pemahaman yang mendalam terhadap peraturan pelaksanaan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak perseorangan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak dari tahun ke tahun.

Tabel 2.1

Ringkasan Penelitian Terdahulu

Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
Rini Khairiah (2009)	Analisis tingkat pemahaman wajib pajak mengenai peraturan pelaksanaan PBB dan pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak di Kecamatan Guguk Kabupaten 50 Kota	menunjukkan sikap positif terhadap peraturan pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan. Pemahaman wajib pajak mengenai peraturan pelaksanaan PBB berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
Pancawati Hardiningsih dan Nila Yulianawati (2011)	Faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak.	Kesadaran membayar pajak, kualitas layanan signifikan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak. Pengetahuan, pemahaman peraturan perpajakan dan persepsi efektivitas sistem perpajakan tidak

		berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.
Agus Nugroho Jatmiko (2006)	Pengaruh sikap wajib pajak pada pelaksanaan sanksi denda, pelayanan fiskus dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.	Sikap WP terhadap pelaksanaan sanksi denda, pelayanan fiskus dan kesadaran perpajakan secara parsial memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan WP.

Berdasarkan pada literatur dan penelitian-penelitian di atas, maka hipotesis alternatif dirumuskan sebagai berikut:

Ha : Terdapat pengaruh signifikan antara pemahaman wajib pajak mengenai peraturan pelaksanaan PBB terhadap kepatuhan wajib pajak di Kecamatan Marpoyan Damai.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Menurut metodenya, jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian survei yang berupa penelitian penjelasan dan pengujian hipotesa. Dalam penelitian survei, informasi dari responden dikumpulkan menggunakan kuesioner yang datanya dikumpulkan dari sampel atau populasinya (Sugiono: 2004).

3.2 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini termasuk dalam kelompok penelitian korelasi. Penelitian korelasi adalah suatu penelitian yang bersifat menghubungkan antara variabel x dan y(Sugiono 2004:32).

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data primer, yaitu data yang berasal dari objek penelitian yang secara langsung dikumpulkan dan diolah sendiri oleh peneliti dengan menggunakan instrumen kuesioner. Dalam penelitian ini data akan dikumpulkan dengan metode survei yang akan dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner secara langsung kepada masing-masing koresponden, yaitu dengan cara turun secara langsung kelapangan tempat dimana para koresponden berada.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang dibutuhkan. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data dari kantor Camat Marpoyan Damai yang beralamat di jalan Arifin Ahmad dan kantor Dinas Pendapatan Daerah

yang beralamat di jalan Teratai Sukajadi, Pekanbaru.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara:

1. Observasi, yaitu metode mengumpulkan data dengan mengamati langsung di lapangan dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.
2. Metode Kuesioner (Angket), yaitu suatu daftar yang berisikan rangkaian pertanyaan mengenai suatu masalah atau bidang yang akan diteliti. Untuk memperoleh data, angket disebarakan kepada responden (wajib pajak). Data tersebut kemudian diolah dengan menggunakan software SPSS.

3.4 Populasi , Sampling dan Metode Pengambilan Sampling

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang berlokasi di Kecamatan Marpoyan Damai. Sampel merupakan sekumpulan data yang diambil atau diseleksi dari suatu populasi.

Sampel menggambarkan keadaan populasi, tetapi walaupun mewakili sampel bukan merupakan duplikat dari populasi (Cholid Narbuko dan H.Abu Achmadi 2009: 107). Sampel dalam penelitian ini adalah orang yang mempunyai, memiliki, menguasai, dan memperoleh hak atas tanah dan bangunan yang biasanya melakukan pembayaran PBB terutang. Responden yang dipilih sebagai sampel adalah semua wajib pajak PBB yang melakukan pembayaran pajak.

Tabel 3.1
Luas, Jumlah Penduduk, dan Kepadatan Penduduk Menurut
Kelurahan di Kecamatan Marpoyan Damai

No	Kelurahan	Luas (Km²)	Jumlah Penduduk	Kepadatan Tiap Km²
1	Tangkerang Barat	5,35	17.916	3.349
2	Tangkerang Tengah	4,65	34.438	7.402
3	Sidomulyo Timur	7,19	26.126	3.634
4	Wonorejo	1,34	20.369	15.207
5	Maharatu	11,26	31.749	2.819
	Jumlah	29,79	130.598	4.384

Sumber: Kantor Camat Marpoyan Damai

Dari 130.598 orang penduduk yang berada di Kecamatan Marpoyan Damai, 28.761 orang diantaranya merupakan wajib pajak orang pribadi yang membayar pajak terutang. Dalam menetapkan jumlah sampel, penulis melakukan penelitian terhadap sampel yang mewakili populasinya yang disebabkan oleh objek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas.

Tabel 3.2

**Daftar Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Berdasarkan SPPT Cetak Massal
Tahun 2012 di Kecamatan Marpoyan Damai**

No	Kelurahan	Jumlah
1	Tangkerang Barat	2.143
2	Tangkerang Tengah	6.633
3	Sidomulyo Tiimur	5.330
4	Wonorejo	6.244
5	Maharatu	8.411
	Jumlah	28.761

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa wajib pajak yang paling banyak di dominasi oleh kelurahan Maharatu, yaitu sebanyak 8.411 orang.

Pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan dengan:

1. Teknik *area probability sampling* yaitu cara pengambilan sampel yang berdasarkan pada pembagian area (daerah-daerah) yang ada pada populasi (Cholid Narbuko dan H.Abu Achmadi 2009: 107).
2. Teknik *cluster sampling* yaitu kelompok-kelompok yang anggotanya heterogen ditentukan terlebih dahulu, kemudian dipilih secara acak dari tiap kelompok tersebut.

Agar sampel yang diambil dalam penelitian ini dapat mewakili populasi maka dapat ditentukan jumlah sampel yang dihitung dengan menggunakan rumus Slovin:

$$n = N / Nd^2 + 1$$

Keterangan:

n : Jumlah sampel

N : Jumlah populasi

e :Nilai kritis yang diinginkan
(persentase kelonggaran ketidakelitian karena kesalahan penarikan sampel sebesar 10%).

$$\begin{aligned} n &= 28.761 / 28.761(0,1)^2 + 1 \\ &= 28.761 / 288,61 \\ &= 99,65 \end{aligned}$$

Dari rumus tersebut didapati hasil jumlah sampel penelitian sejumlah 99,65 responden dan dikenakan menjadi 100 responden.

3.5 Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel

Konsep yang akan diukur dalam penelitian ini adalah pemahaman wajib pajak yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Operasionalisasi variabel dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan beberapa indikator empirik yang telah disiapkan. Pertanyaan-pertanyaan yang akan dicantumkan dalam kuesioner akan dikembangkan sesuai dengan indikator empirik yang digunakan dalam pengukuran konsep.

Variabel-variabel yang diukur tersebut adalah:

1. Pemahaman wajib pajak mengenai peraturan pelaksanaan PBB

Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada. Wajib pajak yang tidak paham akan peraturan perpajakan maka cenderung menjadi wajib pajak yang tidak taat (Pancawati Hardiningsih dan Nila Yulianawati: 2011).

Variabel ini diukur dengan menggunakan indikator sebagai berikut:

- 1) Pendaftaran NPWP bagi setiap wajib pajak yang memiliki penghasilan.
- 2) Pemahaman tentang hak dan kewajiban perpajakan.
- 3) Pemahaman mengenai tarif pajak. (Sri Rizki Utami dkk: 2012).

2. Kepatuhan wajib pajak

Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Wajib pajak patuh merupakan wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan (Rini Khairiah: 2009).

Variabel ini diukur dengan menggunakan indikator sebagai berikut:

- 1) Kepatuhan dalam hal pendaftaran diri sebagai wajib pajak.

- 2) Kepatuhan dalam hal pelaporan, seperti penyampaian SPPT sebelum jatuh tempo.
- 3) Kepatuhan dalam hal membayar pajak (Sri Rizki Utami dkk: 2012) .

3.6 Identifikasi dan Pengukuran Variabel

Dalam penelitian ini, variabel yang digunakan adalah 2 variabel, yaitu variabel dependen (tingkat kepatuhan wajib pajak/ variabel Y) dan variabel independen (tingkat pemahaman wajib pajak mengenai peraturan pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan/ variabel X) .

Untuk mengukur variabel pemahaman wajib pajak terhadap peraturan pelaksanaan PBB (variabel X), peneliti menggunakan instrument dalam bentuk kuesioner dengan menggunakan skala likert 1 poin sampai 5 poin, dimana skala 1 sebagai skala rendah sampai skala 5 sebagai skala tinggi. Diberikan alternatif pilihan “1 (Sangat Tidak Setuju)”, “2 (Tidak Setuju)”, “3 (Ragu-ragu)”, “4 (Setuju)”, “5 (Sangat Setuju)”. Arti skala tersebut adalah: skala 1 (rendah) menunjukkan bahwa wajib pajak belum memahami sepenuhnya terhadap peraturan pelaksanaan PBB dan menganggap tidak perlu membayar PBB (bersikap negatif). Skala 5 (tinggi) menunjukkan bahwa wajib pajak telah memahami arti pentingnya membayar PBB dan paham sepenuhnya terhadap peraturan pelaksanaan PBB (bersikap positif).

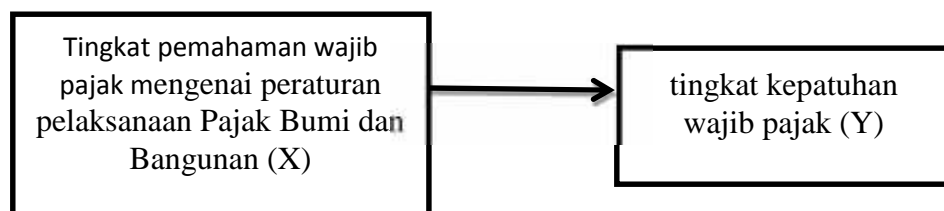
Untuk mengukur variabel kepatuhan (variabel Y) peneliti menggunakan instrument dalam bentuk kuesioner dengan menggunakan skala likert 1 poin sampai 5 poin, dimana skala 1 sebagai skala rendah sampai skala 5 sebagai skala tinggi. Diberikan alternatif pilihan “1 (Sangat Tidak Setuju)”, “2 (Tidak Setuju)”,

”3 (Ragu-ragu)”, “4 (Setuju)”, “5 (Sangat Setuju)”. Arti skala tersebut adalah: skala 1 (rendah) menunjukkan keengganan WP dalam membayar PBB, keteledoran serta seringnya melakukan keterlambatan dalam pembayaran PBB (bersikap negatif). Sedangkan skala 5 (tinggi) menunjukkan antusias wajib pajak dalam membayar PBB, intensitas WP membayar PBB, kedisiplinan dan membayar PBB dengan tepat waktu (bersikap positif).

3.7 Kerangka Pemikiran

Untuk mengetahui hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 3.1 : Kerangka Pemikiran



3.8 Teknik Pengujian Instrumen

3.8.1 Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu yang dilihat dari kriteria nilai rata-rata (mean), standar deviasi, maksimum, minimum, sum, kurtosis dan skweness (Imam Ghozali, 2006).

3.8.2 Uji Kualitas Data

Instrumen penelitian merupakan media dalam pengumpulan data, sehingga kuesioner dikatakan reliable jika jawaban responden konsisten bila diajukan pertanyaan yang sama dalam waktu yang berbeda. Untuk mengetahui reliabilitas suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel penelitian, maka

diperlukan uji reliabilitas dan validitas. Untuk menguji kualitas data yang diperoleh dari penerapan instrumen, maka diperlukan uji validitas dan reliabilitas.

3.8.2.1 Uji Validitas

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau kesesuaian suatu instrumen. Suatu instrumen yang valid mempunyai validitas tinggi dan sebaliknya bila tingkat validitasnya rendah maka instrumen tersebut kurang mengukur apa yang hendak diukur atau diinginkan. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila dapat mengungkapkan data dari variabel yang diteliti.

Dalam analisis ini apabila item dikatakan valid pasti reliabel. Untuk mengetahui tingkat validitas perhatikan angka pada *Corrected Item-Total Correlation* yang merupakan korelasi antara skor item dengan skor total item (nilai r_{hitung}) dibandingkan dengan r_{tabel} . Jika nilai r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} atau $r_{hitung} > \text{nilai } r_{tabel}$, maka item tersebut adalah valid.

3.8.2.2 Uji Reliabilitas (*Test of Reliability*)

Reliabilitas menunjuk suatu pengertian bahwa suatu instrumen dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah dianggap baik. Instrumen yang baik tidak akan bersifat tendensius mengarahkan responden untuk memilih jawaban-jawaban tertentu. Reliabel artinya dapat dipercaya juga dapat diandalkan. Sehingga beberapa kali diulang pun hasilnya akan tetap sama (konsisten).

Pengujian reliabilitas kita lihat nilai *Cronbach's Alpha*. Jika nilainya lebih besar dari 0,6, dapat disimpulkan bahwa kuesioner tersebut reliabel.

3.8.3 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel dependen dan variabel independen keduanya memiliki distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati.

Untuk mengujinormalitas, peneliti menggunakan *Kolmogorov- Smirnov Test* dengan kriteria adalah jika masing-masing variabel menghasilkan nilai K-S-Z dengan $P > 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa masing-masing variabel yang diteliti berdistribusi normal dan untuk menguji kenormalan *disturbance error* (variabel gangguan) digunakan pendekatan Grafik Program SPSS, yaitu *normal probability plot* yang mendeteksi normalitas dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal grafik.

3.9 Metode Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier sederhana, yaitu analisis yang digunakan untuk mengetahui hubungan fungsional ataupun kausal antara satu variabel independen (X) dengan satu variabel dependen (Y). Analisis ini bertujuan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel X dengan variabel Y apakah positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel Y apabila nilai variabel X mengalami kenaikan atau penurunan (Dwi Priyatno 2008:66).

Bentuk umum persamaan regresi adalah : $Y = a + bx$.

Nilai a dan b dapat dihitung dengan menggunakan persamaan:

$$a = \frac{\sum Y - b \cdot \sum X}{n}$$

$$b = \frac{n \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{n \sum X^2 - (\sum X)^2}$$

Keterangan:

X = Variabel independen (bebas) yaitu pemahaman wajib pajak mengenai peraturan pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan

Y = Variabel dependen (terikat) yaitu kepatuhan wajib pajak

a = Y bila X = 0 (harga konstan)

b = Angka arah atau koefisien regresi, yang menunjukkan angka peningkatan ataupun penurunan variabel dependen yang didasarkan pada variabel independen. Bila b (+) maka naik, dan bila (-) maka terjadi penurunan.

n = Jumlah data

3.9.1 Analisis Korelasi Sederhana (*Bivariate Correlation*)

Analisis yang dilakukan untuk menguji keeratan hubungan antara pemahaman wajib pajak mengenai peraturan pelaksanaan PBB (X) dengan kepatuhan (Y) dan untuk mengetahui arah hubungan yang terjadi. Dasar pengambilan keputusan dalam hipotesis ini adalah :

1. Jika probabilitas > 0,05 maka Ha ditolak
2. Jika probabilitas < 0,05 maka Ha diterima

Untuk mengetahui koefisien korelasi dapat dicari dengan persamaan:

$$r = \frac{n \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{n \sum X^2 - (\sum X)^2} \sqrt{n \sum Y^2 - (\sum Y)^2}}$$

Dimana:

	=	Jumlah
r	=	Korelasi
n	=	Banyaknya sampel
x	=	Variabel independen
y	=	Variabel dependen
xy	=	Hasil perkalian antara variabel independen dengan skor variabel dependen
y ²	=	Hasil perkalian kuadrat dari hasil nilai skor variabel Dependen
x ²	=	Hasil perkalian kuadrat dari hasil nilai skor variabel independen

Sedangkan untuk mengetahui tinggi atau rendahnya korelasi antara variabel X dan variabel Y, maka dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.3
Pedoman untuk memberikan interval interpretasi koefisien korelasi

Besarnya nilai r	Tingkat Hubungan
0,000 – 0,199	Sangat rendah
0,20 – 0,399	Rendah
0,4 – 0,599	Sedang
0,6 – 0,799	Kuat
0,80 – 1,000	Sangat Kuat

Sumber : Sugiyono (2004)

3.9.2 Uji linearitas (*Test for Linearity*)

Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah antara pemahaman wajib pajak mengenai peraturan pelaksanaan PBB (X) dengan kepatuhan (Y) mempunyai hubungan yang linear atau tidak secara signifikan, dengan taraf signifikansi 0,05. Dua variabel dikatakan mempunyai hubungan yang linear apabila signifikansi (*linearity*) kurang dari 0,05.

3.10 Pengujian Hipotesis

Uji hipotesis merupakan pengujian yang digunakan untuk menguji hipotesis penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya.

3.10.1 Uji Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara individual atau parsial serta untuk mengetahui variabel independen yang mempunyai pengaruh dominan terhadap variabel dependen dengan mengukur derajat hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen.

Uji t ini dilakukan dengan membandingkan nilai t_{hitung} dan t_{tabel} . Nilai t_{hitung} dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$t = \frac{b}{S(b)}$$

Keterangan:

t	=	Nilai mutlak pengujian
b	=	Koefisien regresi variabel
s (b)	=	standar error variabel

Keputusan yang didasarkan pada besarnya nilai t hitung adalah sebagai berikut :

- Jika probabilitas > 0,05 maka H_a ditolak
- Jika probabilitas < 0,05 maka H_a diterima

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pembahasan pada bab ini meliputi hasil penelitian tentang pengaruh pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di kecamatan Marpoyan Damai. Dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kuantitatif, data diperoleh dengan cara menyebarkan kuesioner kepada 100 orang responden yang dijadikan sampel dalam penelitian.

4.1 Deskriptif Karakteristik Responden

Dalam penelitian ini karakteristik responden meliputi jenis kelamin, umur, pendidikan, dan pekerjaan.

4.1.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4.1 Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Kriteria	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
Laki-laki	51	51
Perempuan	49	49
Jumlah	100	100

Sumber: Data diolah tahun 2013

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa wajib pajak lebih didominasi oleh orang yang berjenis kelamin laki-laki dengan jumlah 51 orang (51%) sedangkan sisanya sebanyak 49 orang (49%).

4.1.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Umur

Hasil yang diperoleh dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 4.2 Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Umur

Kriteria	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
20-30 tahun	28	28
30-40 tahun	43	43
>40 tahun	29	29
Jumlah	100	100

Sumber: Data diolah tahun 2013

Berdasarkan tabel 5.1 diatas dapat dilihat bahwa responden yang berumur 20 sampai 30 tahun sebanyak 28 orang (28%), sedangkan berusia 30 sampai 40 tahun sebanyak 43 orang (43%), dan sisanya sebanyak 29 orang (29%) yang berusia diatas 40 tahun.

4.1.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

Tabel 4.3 Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Kriteria	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
SMA	36	36
DIII	26	26
SI	38	38
Jumlah	100	100

Sumber: Data diolah tahun 2013

Berdasarkan tabel diatas, wajib pajak yang tamat dari Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 36 orang (36%), tamatan DIII sebanyak 26 orang (26%), dan tamatan SI sebanyak 38 orang (38%).

4.1.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan

Tabel 4.4 Identitas Responden Berdasarkan Pekerjaan

Kriteria	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
PNS	28	28
Pegawai Swasta	44	44
Wiraswasta	28	28
Jumlah	100	100

Sumber: Data diolah tahun 2013

Berdasarkan tabel diatas, wajib pajak yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 28 orang (28%), sebagai pegawai swasta sebanyak 44 orang (44%), dan yang berprofesi sebagai wiraswasta sebanyak 28 orang (28%).

4.2 Statistik Deskriptif Responden

Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan variabel-variabel dalam penelitian ini. Analisis yang dilakukan adalah deskripsi nilai rata-rata, standar deviasi, nilai minimum, dan nilai maksimum dari setiap variabel. Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka dapat diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4.5 Statistik Deskriptif Responden

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pemahaman	100	12	25	18.50	2.823
Kepatuhan	100	13	25	19.93	2.618
Valid N (listwise)	100				

Sumber: Data olahan SPSS

Dari tabel 4.5 terlihat bahwa pemahaman memiliki nilai minimum sebesar 12, nilai maksimum sebesar 25, dan nilai rata-rata sebesar 18,50. Jika jawaban responden rata-rata diatas maka responden tersebut memiliki pemahaman yang lebih tinggi terhadap Pajak Bumi dan Bangunan. Sedangkan variabel kepatuhan memiliki nilai minimum sebesar 13, nilai maksimum sebesar 25, dan nilai rata-rata sebesar 19,93, maka responden tersebut memiliki kepatuhan yang tinggi dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Berikut ini tanggapan responden terhadap masing-masing variabel dalam penelitian ini:

Tabel 4.6 Tanggapan Responden Terhadap Variabel Pemahaman

No	Pernyataan	Persentase					
		STS	TS	N	S	SS	
1	Wajib Pajak harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	-	-	19	55	26	100
2	Mendaftarkan objek pajak dengan mengisi Surat Pemberitahuan Objek Pajak.	-	3	22	42	33	100
3	Besarnya tarif Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 0,5%.	2	9	22	46	21	100
4	Besarnya pajak terhutang telah ditentukan oleh pemerintah	3	16	39	33	9	100
5	Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak daerah.	5	11	37	39	8	100
	Jumlah	10	39	139	215	97	500
	Persentase (%)	2	7,8	27,8	43	19,4	100

Sumber: Data diolah tahun 2013

Berdasarkan tabel 4.6 diatas dapat dilihat bahwa pernyataan tentang variabel pemahaman wajib pajak terhadap peraturan pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan yang menyatakan sangat setuju sebanyak 19,4% responden, sebanyak 43% responden yang menyatakan setuju, sebanyak 27,8% responden yang menyatakan netral, sebanyak 7,8% responden yang menyatakan tidak setuju, dan sebanyak 2% responden yang menyatakan sangat tidak setuju.

Tanggapan responden sebagaimana pada tabel 4.6 menunjukkan sebagian besar responden memberikan tanggapan yang positif terhadap pemahaman wajib pajak mengenai peraturan pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan.

Tabel 4.7 Tanggapan Responden Terhadap Variabel Kepatuhan

No	Pernyataan	Pilihan					
		STS	TS	N	S	SS	
1	Wajib Pajak mendaftarkan diri sebagai wajib pajak untuk memenuhi kewajiban sebagai warga negara yang baik.	-	3	22	42	33	100
2	Wajib pajak memenuhi ketentuan penyampaian SPT sebelum batas waktu.	-	-	19	55	26	100
3	Wajib Pajak membayar pajak terutang dengan benar.	2	9	22	46	21	100
4	Wajib Pajak akan patuh membayar denda administrasi.	0	2	10	59	29	100

5	Wajib Pajak memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.	0	8	16	53	23	100
	Jumlah	2	22	89	255	132	500
	Persentase (%)	0,4	4,4	17,8	51	26,4	100

Sumber: Data diolah tahun 2013

Berdasarkan tabel 4.7 diatas dapat dilihat bahwa pernyataan tentang variabel kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan yang menyatakan sangat setuju sebanyak 26,4% responden, sebanyak 51% responden yang menyatakan setuju, sebanyak 17,8% responden yang menyatakan netral, sebanyak 4,4% responden yang menyatakan tidak setuju, dan sebanyak 0,4% responden yang menyatakan sangat tidak setuju.

Tanggapan responden sebagaimana pada tabel 4.7 menunjukkan sebagian besar responden memberikan tanggapan yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak mengenai peraturan pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan.

4.3 Pengujian Kualitas Data

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya yang dilakukan yaitu melakukan uji kualitas data yaitu menguji validitas data, reliabilitas data, dan uji normalitas.

4.3.1 Uji validitas

Validitas didefinisikan sebagai sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Sedangkan reliabilitas pada dasarnya adalah sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. Jika hasil

pengukuran yang dilakukan berulang menghasilkan hasil yang relatif sama, pengukuran tersebut dianggap memiliki tingkat reliabilitas yang baik.

Hubungan antara suatu tes (pengukuran) dengan suatu kriteria digambarkan dengan nilai korelasi dengan nama koefisien korelitas (r). Besar nilai koefisien validitas (r_{hitung}) dari setiap butir pertanyaan terlebih dahulu dibandingkan dengan besarnya nilai r_{tabel} pada $df=5\%$, yaitu:

$$\begin{aligned} r_{tabel} &= df ; (n-2) \\ &= 5\% ; (100-2) \\ &= (0,05) ; 98 \\ &= 0,197 \end{aligned}$$

Tabel 4.8 Hasil Uji Validitas Variabel Pemahaman

Item pertanyaan	Corrected Item-Total Correlation	r tabel	Keterangan
X.1	0,524	0,197	Valid
X.2	0,377	0,197	Valid
X.3	0,295	0,197	Valid
X.4	0,446	0,197	Valid
X.5	0,408	0,197	Valid

Sumber: Data olahan SPSS

Dari tabel 4.8 diatas dapat dilihat bahwa variabel pemahaman yang terdiri dari 5 item pertanyaan dengan hasil uji validitas menunjukkan nilai korelasi yang terendah yaitu item X.3 sebesar 0,295. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semua item variable diatas 0,05 yang berarti memenuhi syarat valid.

Tabel 4.9 Hasil Uji Validitas Variabel Kepatuhan

Item pertanyaan	Corrected Item-Total Correlation	r tabel	Keterangan
Y.1	0,608	0,197	Valid
Y.2	0,520	0,197	Valid
Y.3	0,379	0,197	Valid
Y.4	0,333	0,197	Valid
Y.5	0,319	0,197	Valid

Sumber: Data olahan SPSS

Dari tabel 4.9 diatas dapat dilihat bahwa variabel pemahaman yang terdiri dari 5 item pertanyaan dengan hasil uji validitas menunjukkan nilai korelasi yang terendah yaitu item X.5 sebesar 0,319. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semua item variable diatas 0,05 yang berarti memenuhi syarat valid.

4.3.2 Uji Reliabilitas

untuk alat tes yang baik reliabilitasnya adalah item yang mempunyai nilai koefisien reliabilitasnya $> 0,6$. Berikut ini hasil pengujian reliabilitas untuk setiap variabel dalam penelitian ini:

Tabel 4.10 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Pemahaman**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
.646	5

Sumber: Data olahan SPSS

Berdasarkan uji reliabilitas diatas terlihat bahwa variabel pemahaman memenuhi syarat reliabilitas dengan nilai *Cronbach's Alpha* dinyatakan reliabel karena memiliki nilai koefisien alpha $> 0,6$, yaitu sebesar 0,646.

Tabel 4.11 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Kepatuhan**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
.666	5

Sumber: Data olahan SPSS

Berdasarkan uji reliabilitas diatas terlihat bahwa variabel pemahaman memenuhi syarat reliabilitas dengan nilai *Cronbach's Alpha* dinyatakan reliabel karena memiliki nilai koefisien alpha $> 0,6$, yaitu sebesar 0,666.

4.3.3 Uji Normalitas

Uji normalitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah residual yang diteliti berdistribusi normal atau tidak. Untuk menguji normalitas dalam data penelitian ini menggunakan *Kolmogorov-Smirnov*, kriteria yang digunakan adalah jika masing-masing variabel menghasilkan nilai K-S-Z dengan $P > 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

Hasil uji normalitas disajikan pada tabel 4.12 berikut:

Tabel 4.12 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Pemahaman	Kepatuhan
N		100	100
Normal Parameters ^a	Mean	18.50	19.93
	Std. Deviation	2.823	2.618
Most Extreme Differences	Absolute	.110	.109
	Positive	.110	.109
	Negative	-.102	-.101
Kolmogorov-Smirnov Z		1.103	1.093
Asymp. Sig. (2-tailed)		.175	.183
a. Test distribution is Normal.			
Sumber: Data olahan SPSS			

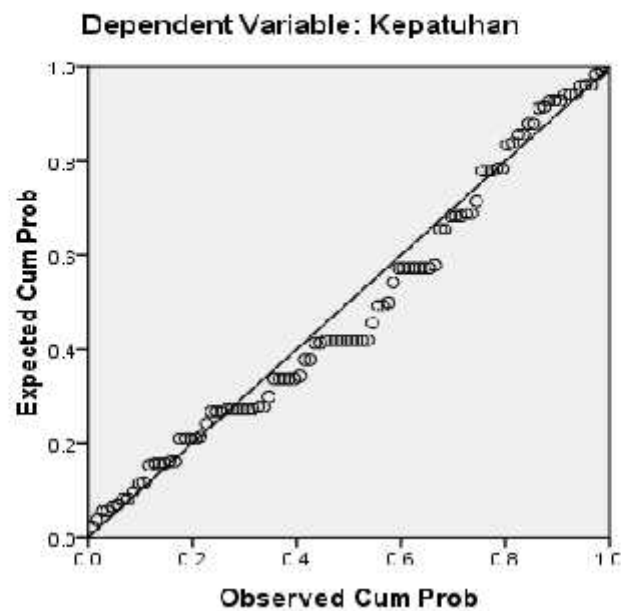
Tabel 4.12 diatas menunjukkan nilai K-S-Z untuk variabel pemahaman sebesar 1,103 dengan signifikansi 0,175. Sedangkan nilai K-S-Z untuk variabel kepatuhan sebesar 1,093 dengan tingkat signifikansi 0,183. Data dikatakan normal apabila nilai *Asymp.Sig.(2-tailed)* > 0,05. Oleh karena 0,175 dan 0,183 > 0,05, maka dapat diambil kesimpulan bahwa semua variabel secara statistik telah berdistribusi normal dan layak digunakan sebagai data penelitian.

Nilai residual berdistribusi normal merupakan suatu kurva berbentuk lonceng (*bell-shape-curve*) yang kedua sisinya melebar sampai tidak hingga.

Maka model regresi memenuhi asumsi normalitas seperti terlihat pada gambar 4.1.

Gambar 4.1: Diagram P-Plot Normalitas

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Sumber: Data olahan SPSS

4.4 Uji Asumsi Klasik

4.4.1 Uji Korelasi

Tabel 4.13 Hasil Uji Korelasi

Correlations			
		Pemahaman	Kepatuhan
Pemahaman	Pearson Correlation	1	.640**
	Sig. (1-tailed)		.000
	N	100	100
Kepatuhan	Pearson Correlation	.640**	1
	Sig. (1-tailed)	.000	
	N	100	100

**. Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).

Sumber: Data olahan SPSS

Dari hasil analisis korelasi sederhana (r) diatas, terdapat korelasi antara pemahaman wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,640. Hal ini menunjukkan terjadi hubungan yang kuat antara pemahaman dengan kepatuhan. Sedangkan arah hubungan adalah positif karena nilai r positif, berarti semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat.

4.4.2 Uji Linearitas

Tabel 4.14 Hasil Uji Linearitas

ANOVA Table

			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Kepatuhan * Pemahaman	Between Groups	(Combined)	314.548	12	26.212	6.266	.000
		Linearity	278.190	1	278.190	66.497	.000
		Deviation from Linearity	36.357	11	3.305	0.790	.649
	Within Groups		363.962	87	4.183		
	Total		678.510	99			

Sumber: Data olahan SPSS

Dari output diatas dapat diketahui bahwa nilai signifikansi pada *Linearity* sebesar 0,000. Karena signifikansi kurang dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa antara variabel pemahaman wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak terdapat hubungan yang linear.

4.5 Pengujian Hipotesis

Penelitian ini menggunakan regresi linear sederhana, untuk memperoleh kesimpulan dari analisis, terlebih dahulu dilakukan pengujian hipotesis yang dilakukan secara parsial (uji t). Tahap-tahap yang perlu dilakukan dalam pengujian hipotesis adalah:

4.5.1 Analisis Regresi Sederhana

Tabel 4.15 Hasil Pengujian Hipotesis

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	8.945	1.346		6.644	.000
Pemahaman	.594	.072	.640	8.252	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan

Sumber: Data diolah SPSS

Persamaan regresi dari hasil perhitungan statistik didapat sebagai berikut:

$$Y = a + bX$$

$$Y = 8,945 + 0,594X$$

Arti persamaan linear tersebut:

1. Konstanta sebesar 8,945 menyatakan bahwa variabel independen tetap, maka variabel dependen sebesar 0,594.
2. Nilai $X = 0,594$ menunjukkan bahwa apabila nilai variabel pemahaman naik 1%, maka variabel kepatuhan akan mengalami peningkatan sebesar 0,594.

Hasil regresi linear sederhana diatas menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak mengenai peraturan pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian dapat

disimpulkan jika pemahaman wajib pajak ditingkatkan, maka kepatuhan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan juga akan meningkat.

4.5.2 Pengujian Variabel Secara Parsial

Uji t dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen pemahaman secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen kepatuhan. Besarnya t hitung dan nilai probabilitas yang dihasilkan dapat menentukan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Berdasarkan tabel 4.15 diatas dapat disimpulkan bahwa H_a dapat diterima jika nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan nilai signifikannya dibawah 5% (0,05). Dimana pada tabel tersebut nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $8,252 > 1,984$ yang berarti H_a diterima. Dari hasil uji hipotesis diatas menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.6 Pembahasan Hasil Penelitian

Pada penjelasan sebelumnya telah dilakukan pengolahan data yang diperoleh dari responden dan kemudian diolah dengan menggunakan program Komputer SPSS 16. Setelah itu dilakukan pembuktian hipotesis. Dari hasil tersebut dapat dijelaskan variabel bebas mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat.

Dari hasil analisis diatas, dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Pancawati Hardiningsih dan Yulianawati (2011), Rini Khairiah (2009), dan Agus Nugroho Jatmiko (2006). Penelitian yang dilakukan oleh Pancawati Hardingsih dan Yulianawati (2011), menunjukkan bahwa adanya pengaruh antara kesadaran wajib pajak dengan

kewajiban membayar pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Rini Khairiah (2009) menunjukkan pemahaman wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Agus Nugroho Jatmiko (2006) juga menunjukkan bahwa sikap wajib pajak terhadap pelaksanaan sanksi denda, pelayanan fiskus dan kesadaran perpajakan secara parsial memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat. Jelas bahwa semakin paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka. Setiap wajib pajak yang telah memahami peraturan perpajakan sangat baik, biasanya akan melakukan aturan perpajakan yang ada sesuai dengan apa yang tercantum di dalam peraturan yang ada. Karena pada prinsipnya, pajak berasal dari rakyat dan untuk rakyat. Pemahaman wajib pajak mengenai Pajak Bumi dan Bangunan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak terhadap keharusan membayar pajak, hal ini menyebabkan makin tingginya tingkat kepatuhan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Berdasarkan landasan teori dari penelitian ini, bahwa wajib pajak yang mempunyai pemahaman yang tinggi/ positif akan peraturan pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan akan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku dan wajib pajak yang mempunyai pemahaman yang rendah cenderung untuk tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya (tidak patuh), dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemahaman wajib pajak

mengenai peraturan pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan berpengaruh positif terhadap kepatuhan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab IV, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor pengetahuan/ pemahaman wajib pajak merupakan salah satu faktor utama dari sisi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pemahaman/ pengetahuan mengenai peraturan pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah variabel yang digunakan untuk mewakili dari sisi wajib pajak dalam menentukan keberhasilan tingkat kepatuhan wajib pajak di Kecamatan Marpoyan Damai dalam penelitian ini.
2. Berdasarkan pengolahan data hasil yang diperoleh dalam penelitian ini bahwa wajib pajak orang pribadi di wilayah Kecamatan Marpoyan Damai tergolong paham dan patuh terhadap peraturan pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan.
3. Secara umum pengujian validitas dan reliabilitas setiap item pertanyaan dalam penelitian ini telah memberikan hasil yang baik. Pengujian validitas untuk semua item pertanyaan dalam setiap variabel dengan menggunakan *Corrected Item-Total Correlation* menunjukkan nilai diatas 0,05 yang berarti semua item pertanyaan dinyatakan valid. Sedangkan pengujian reliabilitas menunjukkan nilai *Cronbach Alpha* 0,646 untuk variabel pemahaman dan 0,666 untuk variabel kepatuhan. Berdasarkan hasil uji reliabilitas tersebut semua variabel menunjukkan nilai diatas 0,6, sehingga

dapat disimpulkan bahwa semua variabel dalam penelitian ini memenuhi syarat reliabel.

4. Normalitas rata-rata jawaban responden yang menjadi data dalam penelitian ini dilihat dari *Kolmogorov-Smirnov* test yang menunjukkan bahwa jawaban responden berdistribusi normal, yaitu sebesar 0,175 untuk variabel pemahaman dan 0,183 untuk variabel kepatuhan. Normalitas juga digambarkan oleh diagram P-Plot Normalitas yang berarti bahwa residual penelitian ini berdistribusi normal. Hal ini dapat dilihat dari kurva yang berbentuk lonceng (*bell-shape-curve*).
5. Dari hasil analisis korelasi yang terjadi antara dua variabel yang diteliti adalah sebesar 0,640 dengan taraf signifikansi 0,00, artinya angka ini dapat diinterpretasikan bahwa terjadi korelasi yang kuat antara pemahaman wajib pajak mengenai peraturan pelaksanaan PBB (X) dengan kepatuhan (Y).
6. Dari hasil analisis linearitas, antara pemahaman wajib pajak mengenai peraturan pelaksanaan PBB (X) dengan kepatuhan (Y) mempunyai hubungan yang linear dengan taraf signifikansi kurang dari 0,05.
7. Berdasarkan hasil uji t diperoleh kesimpulan bahwa variabel pemahaman wajib pajak mengenai peraturan pelaksanaan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, karena nilai signifikannya berada dibawah 0,05 dan pada tabel tersebut nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $8,252 > 1,984$ yang berarti H_a diterima, dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa

pemahaman wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak yang terdaftar di Kecamatan Marpoyan Damai.

5.2 Keterbatasan Penelitian

1. Penelitian ini hanya melihat pengaruh satu variabel independen dan variabel dependen sehingga belum mewakili semua penelitian lain.
2. Ruang lingkup penelitian hanya pada cakupan satu wilayah kecamatan saja, yaitu kecamatan Marpoyan Damai.

5.3 Saran

1. Penelitian selanjutnya diharapkan menambah variabel independennya, seperti faktor ekonomi, pemeriksaan, pendapatan wajib pajak, dan lain-lain agar dapat lebih sempurna menjelaskan elemen dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
2. Untuk penelitian selanjutnya, sebaiknya dasar pemilihan sampel tidak hanya pada satu kecamatan saja tapi dalam lingkup kabupaten.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quranulkarim, Al_maidah ayat 2
- Al-Quranulkarim, At-taubah ayat 29
- Al-Quranulkarim, Al-Zalzalalah ayat 7
- Bohari. 2010. *Pengantar Hukum Pajak*. Jakarta: Rajawali Pers
- Diana, Anastasia dan Setiawati, Lilis. 2009. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Andi
- Fidel. 2010. *Cara Mudah dan Praktis Memahami Masalah-masalah Perpajakan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Fitriandi, Primandita dkk. 2009. *Kompilasi Undang-undang Perpajakan Terlengkap*. Jakarta: Salemba Empat
- Ghoni, Husen Abdul. 2012. *Pengaruh Motivasi Dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Daerah*. Skripsi pada Jurusan Akuntansi Universitas Negeri Surabaya
- Ghozali, Imam. 2006. *Analisis Multivariate*. Semarang: Undip
- Gusfahmi. 2007. *Pajak Menurut Syariah*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada
- Hardiningsih, Pancawati dan Yulianawati, Nila. 2011. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak*. Jurusan Akuntansi Universitas Stikubank Semarang
- Hartono. 2008. *SPSS 16, Analisis Data Statistik dan Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Hartono. 2010. *SPSS 16.0 Analisis Data Statistika dan Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Jatmiko, Agus Nugroho. 2006. *Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Tesis pada Jurusan Akuntansi Universitas Diponegoro
- Katalog BPS. 2012. *Kecamatan Marpoyan Damai dalam Angka 2012*. Pekanbaru
- Khairiah, Rini. 2009. *Analisis Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Peraturan Pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pengaruhnya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kecamatan Guguk*. Skripsi pada Jurusan Akuntansi UNAND Padang
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: Andi

- Muljono, Djoko. 2010. *Panduan Brevet Pajak*. Yogyakarta: Andi
- Narbuko, Cholid dan Achmadi, Abu. 2009. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara
- Nurmantu, Safri. 2005. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit
- Pemerintah Kota Pekanbaru. 2011. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2011 tentang *Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan*. Pekanbaru
- Priyatno, Dwi. 2008. *Mandiri Belajar SPSS (Statistical Product and Service Solution) untuk Analisis Data dan Uji Statistik*. Jakarta: Media Kom
- Pudyatmoko, Y Sri. 2009. *Pengantar Hukum Pajak*. Yogyakarta: Andi
- Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang *Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1984 tentang Pajak Bumi dan Bangunan*
- Roseline, Riessa. *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Mengukuhkan Diri Sebagai Pengusaha Kena Pajak (An Analysis of The Factors That Influence Taxpayers Compliance of Confirmation as Taxable Person For Value Added Tax Purposes)*. Jurusan Akuntansi Universitas Brawijaya
- Rusjdi, Muhammad. 2008. *Pbb, Bphtb dan Bea Meterai Edisi Kedua*. Jakarta: PT Macanan Jaya Cemerlang
- Soemitro, Rohmat dan Kania S, Dewi. 2004. *Asas dan Dasar Perpajakan 1*. Bandung: Refika Aditama
- Suandy, Erly. 2008. *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat
- Sugiono. 2004. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: CV Alfabeta
- Supramono dan Damayanti, Theresia W. 2005. *Perpajakan Indonesia Mekanisme dan Perhitungan*. Yogyakarta: Andi
- Putra, Tri Rezeki Perdana. 2009. *Analisis Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Peraturan Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan Di Kota Solok*. Skripsi pada Jurusan Akuntansi UNAND Padang
- Utami, Sri Rizki, Andi Ayu, Noorida Soerono. 2012. *Pengaruh Faktor-faktor Eksternal Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di Lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang*. Jurusan Akuntansi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- Waluyo. 2009. *Perpajakan di Indonesia (Edisi 8)*. Jakarta: Salemba Empat